



# LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN IV TAHUN 2022



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan IV Tahun 2022. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2022 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Jakarta, 20 Januari 2023

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra. Susana Gracia Arpan, Apt, M.Si

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan IV pada tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Jakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan hasil capaian dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”** dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 96,55%dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 104,64%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 106,21%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
4. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 109,76%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
5. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 100,17%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
6. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 99,68%dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**
7. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 104,12% dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
8. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal”, dengan capaian sebesar 100,17%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
9. Sasaran strategis “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal” dengan capaian sebesar 100,88%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
10. Sasaran strategis “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”, dengan capaian sebesar 115,99%dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”**
11. Sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel”, dengan capaian sebesar 99,29%dengan kriteria **“BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI”**

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp 43.705.622.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 43.586.926.108 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu serratus delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,73%.

# HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut:

## 1. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016



Balai Besar POM di Jakarta senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggung jawab predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN RB kepada Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2020, dilaksanakan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Setelah melewati rangkaian persiapan, sosialisasi dan audit sertifikasi, pada

awal Oktober 2022, BBPOM di Jakarta menerima Sertifikat Implementasi SMAP. Hal ini merupakan bukti kesungguhan Kepala BBPOM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si untuk bersama sama jajaran BBPOM di Jakarta menciptakan unit kerja yang bebas dari penyuapan dan praktek KKN yang melanggar kode etik. Implementasi SMAP menjadi salah satu bahan pada studi tiru oleh Balai POM di Gorontalo pada 13 Oktober 2022. Kepala Balai POM di Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt., MM beserta tim melakukan diskusi terkait penerapan SMAP secara nyata di BBPOM di Jakarta.

## 2. Pengawasan Keamanan Pangan (Food Security) dalam Rangka Pertemuan G-20 “Research and Innovation Initiative Gathering” dan “G20 Research and Innovation Minister” di Jakarta



Balai Besar POM di Jakarta kembali melaksanakan kegiatan food-security dalam rangka pertemuan G20 yang bertempat di The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 2022. Berkoordinasi dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku tuan rumah penyelenggaraan G20 Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) dan G20 Research and Innovation Ministers (RIMM), petugas Balai Besar POM di Jakarta melakukan serangkaian pengujian parameter bahan berbahaya pada hidangan yang

disajikan untuk para peserta dan tamu delegasi, diantaranya adalah Arsen, Sianida, Timbal, Nitrit, Formalin, Boraks, Kuning Metanil serta Rhodamin B. Sebelum hari pelaksanaan, Balai Besar POM di Jakarta, yang diwakili oleh Imelda Christine Hutagalung, S.Si, Apt dan Theresia Widiastuti, S.Farm, Apt juga turut menghadiri undangan dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) sebagai narasumber untuk

menyampaikan materi, teknis pelaksanaan serta diskusi terkait tentang food-security di Denkes (Detasemen Kesehatan) Paspampres, Tanah Abang, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2022. Selain itu, petugas Balai Besar POM di Jakarta beserta perwakilan dari Badan POM pusat juga turut melakukan inspeksi fasilitas dapur serta bahan baku yang digunakan di The Ritz Carlton guna memastikan keamanan, kebersihan serta higienitasnya. Hasil inspeksi dinyatakan aman dan memenuhi ketentuan.

### 3. Wujudkan Generasi Cerdas Obat dan Makanan Tanpa Narkoba

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, khususnya di lingkungan pelajar serta menggelorakan Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Pada hari Rabu (23/11/2022) BBPOM di Jakarta melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan dan Mutu Kosmetika serta KIE P4GN untuk Pelajar. Kegiatan KIE tersebut dihadiri oleh 40 SMA yang ada di Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Guru dan Siswa/i kelas X dan XI.



Pada kegiatan KIE tersebut disampaikan materi terkait Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika Aman oleh BBPOM di Jakarta dan materi Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah oleh BNN Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, hadir pula Duta Kosmetik Aman Terbaik II Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 untuk sharing pengalaman selama menjadi Duta Kosmetik Aman. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa

Pelajar dapat melindungi dirinya dari kosmetika yang tidak aman dilaksanakan pula simulasi pengecekan produk melalui BPOM Mobile

### 4. Saksi Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Sebagai bentuk erat kerjasama antara BBPOM di Jakarta dengan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru serta dukungan penuh terhadap kegiatan Bea dan Cukai Pasar Baru, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 BBPOM di Jakarta hadir di Aula KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru dalam rangka menyaksikan pemusnahan sejumlah barang kiriman yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru sejak Desember 2021 hingga Oktober 2022. Adapun kategori barang yang dimusnahkan adalah barang kiriman pribadi yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanan dan tidak memenuhi larangan/pembatasan impor dari instansi terkait, dengan jenis Barang yaitu Barang Asusila, Hasil Tembakau, Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), Alat Kesehatan, Alas Kaki, Barang Bekas, Barang Elektronik, Kosmetik, Obat, Suplemen, Tanaman, Part Senjata, Makanan, dan Box Kosong dimana jumlah keseluruhan sebanyak 1.459 paket dengan nilai perkiraan Rp. 451.133.600,-.

## 5. Food Safety TMII-BBPOM Jakarta Kawal Malam Pergantian Tahun 2023

Untuk memastikan produk pangan jajanan yang diujikan pada malam pergantian tahun baru di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah produk yang aman dikonsumsi, maka BPOM di Jakarta bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, Dinas KPKP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Satpol PP pada Sabtu (31/12/2022) melakukan pemeriksaan / pengujian pangan dengan parameter



kandungan bahan berbahaya. Pemeriksaan food safety dilakukan terhadap pangan jajanan yang dijual oleh penjaja pangan binaan program Jakpreneur, binaan TMII dan penjaja pangan dadakan. Pangan jajanan diuji terhadap kandungan bahan berbahaya Formalin, Boraks, Rhodamin dan Methanil Yellow. Pemeriksaan / pengujian pangan tidak hanya dilakukan terhadap pangan jajanan namun juga pada jamuan VIP dengan kelengkapan parameter uji arsen, sianida dan nitrit (food security).

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pengunjung TMII terkait keamanan pangan. Kegiatan ini bertujuan selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengunjung TMII terkait keamanan pangan, juga sebagai upaya BPOM di Jakarta untuk selalu hadir melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta menjadikan masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam memilih dan mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu.



Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Highlight Kinerja .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Bab I Latar Belakang .....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Isu Strategis.....	3
Bab II Perencanaan Kinerja .....	5
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis .....	5
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun .....	11
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	14
2.5 Metode Pengukuran .....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.2 Realisasi Anggaran .....	18
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	119
Bab 4 Penutup.....	119
4.1 Kesimpulan.....	123
4.2 Saran.....	123

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.



## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

### Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Fungsi

- penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

## 1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta



## 1.4. Isu Strategis

### 1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

#### a. Lingkungan Internal

##### 1. Sumber Daya Manusia

Balai Besar POM di Jakarta per 30 Desember 2022 memiliki 125 PNS dan 18 pramubakti teknis. Jumlah ini masih belum memenuhi standar sesuai Analisis Beban Kerja dan telah dibuatkan perencanaan pemenuhannya sampai dengan tahun 2024.

##### 2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 2.404,00 m<sup>2</sup>, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di No. memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

#### b. Lingkungan Eksternal

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km<sup>2</sup>. Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

## 2. Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

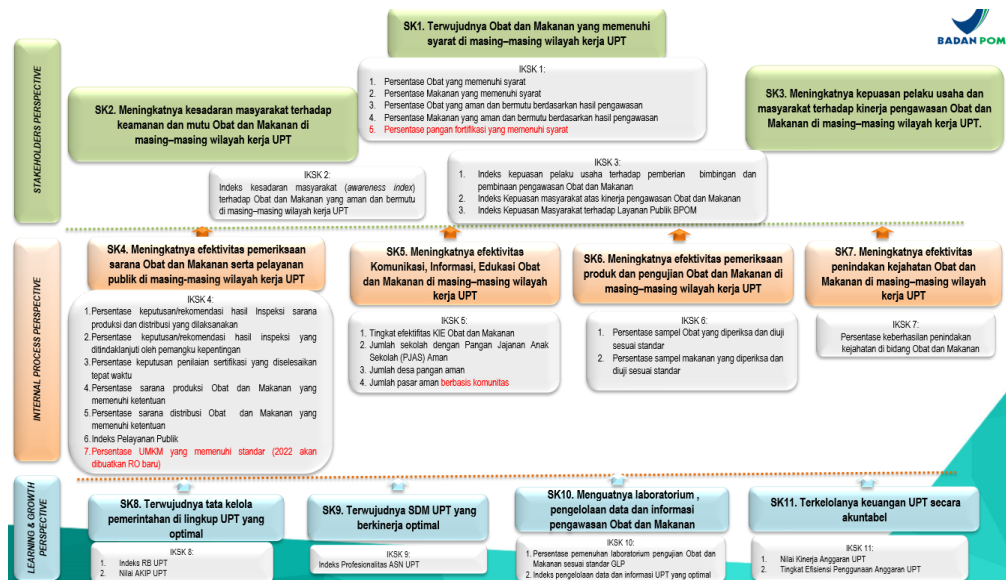
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



**Gambar 3. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta**

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

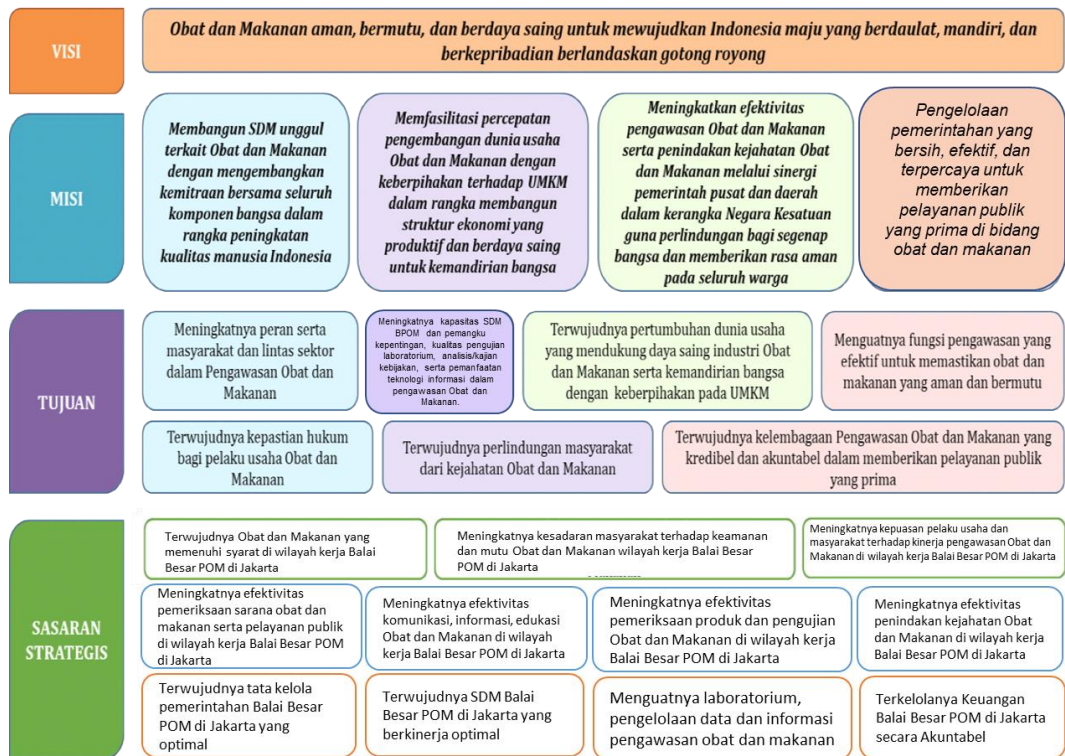
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stakeholder</b>						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,3	4,55	4,65
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
<b>Internal Process</b>						
Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
<b>Learning and Growth</b>						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 4.** Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis.

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
		16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
		19-Jumlah desa pangan aman	21
		20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
		25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.686.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
	02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
	03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
	04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
	05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
	08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65
	09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
	12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
	13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
	14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
	15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
	16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
	18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
	19-Jumlah desa pangan aman	21
	20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
	25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80
09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5
10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
	28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

## 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	298.193.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%	83%	83%	83%	298.193.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89%	89%	89%	89%	50.898.400
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				87	318.225.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87,7	46.325.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				76,65	371.262.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				91	82.596.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90%	90%	90%	90%	396.496.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79%	79%	79%	79%	396.496.750
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87%	87%	87%	87%	295.830.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	160.788.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	75%	75%	75%	632.205.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,30	371.262.500

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				77	85.159.900
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30% (progress)	70% (progress)	90% (progress)	65	767.240.000
		Jumlah desa pangan aman	25% (progress)	40% (progress)	65% (progress)	21	1.097.149.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25% (progress)	70% (progress)	70% (progress)	3	110.081.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				100%	398.702.100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	100%	277.407.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	30%	45%	58%	1.444.888.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				83,4	91.936.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				80	54.154.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84,5	27.090.178.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				82	6.770.065.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	137.915.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	80	86	92,5	28.600.000



## 2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan IV Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA	KESIMPULAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	96,55	Belum Memenuhi Ekspetasi	Kurang Efektif
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	104,64	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	106,21	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	109,76	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100,17	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99,68	Belum Memenuhi Ekspetasi	Kurang Efektif
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	104,12	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	107,89	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	100,88	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	115,99	Memenuhi Ekspetasi	Efektif
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	99,29	Belum Memenuhi Ekspetasi	Kurang Efektif

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW IV Tahun 2022	Volume			Kriteria	Kesimpulan	Anggaran	
				Target	Realisasi	Capaian			Pagu	Realisasi
a	b	c	d	e	f	$g=f/e*100$	h	i	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	80,39	99,25	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	455.244.300	451.672.950
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,5	94,16	98,60	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	256.188.000	255.306.708
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	75	92,59	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	455.244.300	451.672.950
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	88	106,02	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	256.188.000	255.306.708
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	76,8	86,29	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	50.338.400	49.739.221
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87	87	91,04	104,64	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	168.065.100	165.510.641
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7	87,7	95,1	108,44	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	43.462.500	43.414.383
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65	76,65	80,22	104,66	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	196.075.950	193.095.748
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91	96,03	105,53	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	3.069.000	3.065.625
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	102,83	114,26	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	309.634.250	307.879.352

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW IV Tahun 2022	Volume			Anggaran			
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan	Pagu	Realisasi
a	b	c	d	e	f	$g=f/e*100$	h	i	k	l
	di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79,93	101,18	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	316.632.000	314.721.257
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	97,8	112,41	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	312.063.000	304.518.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	71,31	113,19	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	135.006.000	133.652.515
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	84,22	112,29	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	484.262.500	482.106.189
		Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,3	4,72	109,77	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	196.075.950	193.095.748
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	81	105,19	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	63.421.500	63.106.883
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	95,06	100,70	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	2.353.862.000	2.350.893.805
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65	65	65	100	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	720.402.000	705.415.296
		Jumlah desa pangan aman	21	21	21	100	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	1.046.723.000	1.041.629.690
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	3	3	100	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	111.008.100	109.885.560
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	99,52	99,52	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	390.209.400	387.148.243
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	99,83	99,83	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	241.164.000	240.988.800

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target TW IV Tahun 2022	Volume					Anggaran	
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan	Pagu	Realisasi
a	b	c	d	e	f	$g=f/e*100$	h	i	k	l
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	58	60,39	104,12	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	1.267.408.000	1.250.400.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	83,4	83,4	89,98	107,89	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	283.344.000	280.709.958
		Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	80	80	Belum ada nilai dari inspektorat				587.597.000	586.705.519
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,5	84,5	85,24	100,88	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	164.296.000	163.922.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82	85,27	103,99	Memenuhi Ekspekstasi	Efektif	5.551.243.000	5.548.458.065
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,88	128,00	Tidak Dapat Disimpulkan		18.234.000	16.532.735
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	92,5	92,5	91,84	99,29	Belum Memenuhi Ekspekstasi	Kurang Efektif	27.076.660.000	27.045.407.206

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator mencapai target dengan kriteria “**MEMENUHI Ekspektasi**”, 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori “**TIDAK MEMENUHI Ekspektasi**”, 1 (satu) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**” dan 9 (Sembilan) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena merupakan indikator yang hanya bisa dihitung pada akhir tahun 2022.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

**Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

**1. Persentase Obat yang memenuhi syarat**

**a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan IV dengan realisasi TW IV***

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	80,39	99,25	Belum Memenuhi Ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kadaluarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Keterangan:

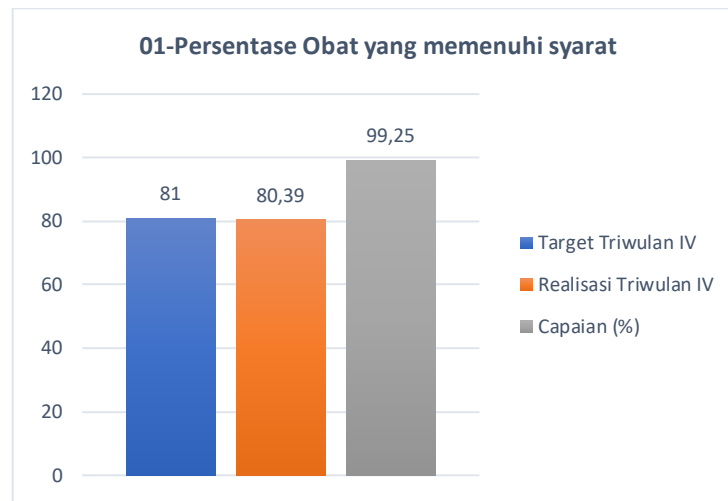
- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk poin 5.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV target tahun 2022**

Realisasi indikator "Persentase Obat yang memenuhi syarat" pada TW IV adalah sebesar 80,39% dengan capaian sebesar yaitu 99,25% termasuk kriteria "Belum memenuhi ekspektasi". Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka disimpulkan termasuk kategori "kurang efektif" sehingga diperlukan evaluasi dan monitoring untuk periode selanjutnya.



Gambar 5. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase Obat yang memenuhi syarat



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Belum tercapainya target indikator kinerja TW IV tahun 2022 dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling acak yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Dari 1632 sampel acak yang masuk laboratorium, seluruhnya sudah selesai diuji (100%), namun yang memenuhi syarat sebesar 1312 sampel (80.39%).

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja**

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industry farmasi, industry kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara

berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).

- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi kesehatan.
- Pengetahuan produsen komoditi kosmetik terhadap ketentuan penandaan belum memadai sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi ketentuan penandaan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan.	Telah dilakukan pendampingan pre market oleh Poksi Pemeriksaan terhadap 7 UMKM produksi Kosmetik selama tahun 2022. Namun masih perlu dilanjutkan lagi di tahun 2023	Kelompok Substansi Pemeriksaan akan lebih mengintensifkan pendampingan pre market kepada produsen Kosmetik dan obat tradisional.	Sepanjang tahun 2023

**2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan IV dengan target TW IV**

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	94,16	98,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

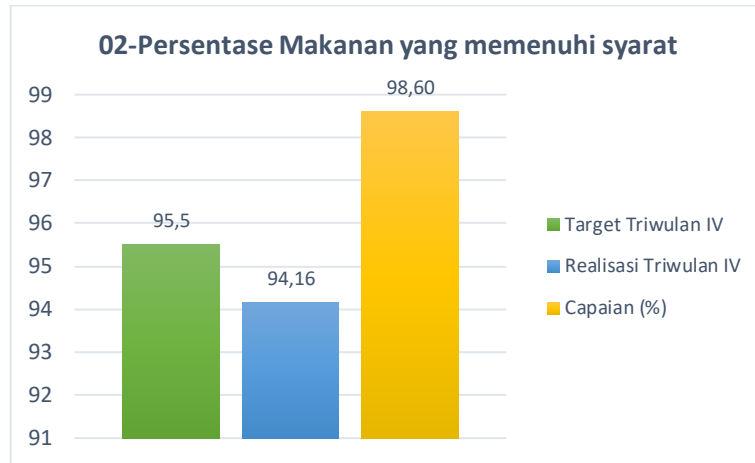
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

**Keterangan :**

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium
- c. Sampel makanan mencakup sampel balai dan Loka

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator “**Persentase Makanan yang memenuhi syarat**” pada TW IV adalah 94.16% dengan capaian sebesar yaitu 98.60% termasuk kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka disimpulkan termasuk kategori “**kurang efektif**” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada triwulan selanjutnya dan capaian tahun 2022.



Gambar 6. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase Makanan yang memenuhi syarat

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- Capaian indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat berada diatas target TW IV tahun 2022 yaitu 98.60% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspetasi” dan persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat hampir mendekati persentase target tahunan Tahun 2022 yaitu 94.16%
- Persentase Belum tercapainya persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat disebabkan meningkatnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan evaluasi hasil pengujian, semua sampel yang masuk ke laboratorium di tahun 2022 telah selesai uji, dari 770 sampel sebanyak 13 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan (TMK Label), 28 sampel tidak memenuhi syarat mutu dan 4 sampel tidak memenuhi syarat mutu dan ketentuan (TMK label).
- Persentase Capaian dan Realisasi sampel makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan III menurun dibandingkan dengan capaian dan realisasi di Triwulan IV di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat masih ada produk yang tidak memenuhi syarat.
- Beberapa produk agar-agar/jelly, madu gula pasir dan gula merah yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat pada tahun ini dan memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di masyarakat. Pada TW IV ini produk yang TMK Major yaitu TMS Label/Penandaan masih ada.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta guna memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan.

***d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja.***

Kegiatan pengawasan, penyidikan, KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas, jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan dan Infokom terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.	Telah dilaksanakan namun perlu ditingkatkan lagi	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek	Sepanjang Tahun 2023
2	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.	Telah dilaksanakan namun perlu ditingkatkan lagi	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK.	Sepanjang Tahun 2023

3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

a. **Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan IV dengan target TW IV**

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	75	92,59	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

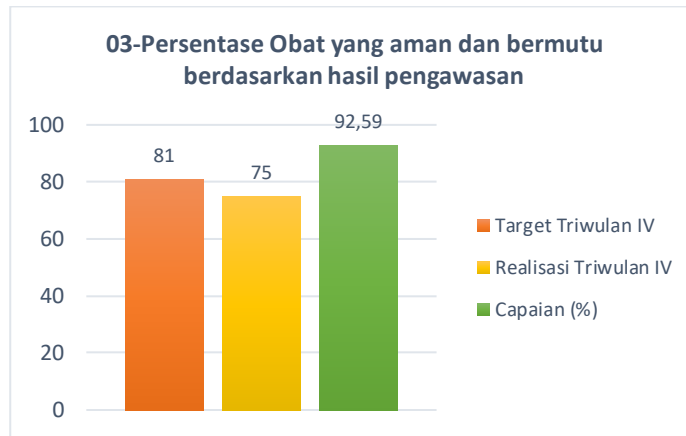
$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada TW IV ini realisasi indikator adalah 75,0% dengan capaian TW IV adalah 92,59% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dengan capaian, termasuk kategori “Kurang Efektif” sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada tahun mendatang.



Gambar 7. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Rendahnya capaian indikator kinerja TW IV tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling targeted yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah. Selain itu terdapat beberapa sampel obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat uji, produksi dari produsen dengan Riwayat TMS. Dari 608 sampel targeted yang masuk laboratorium, seluruhnya sudah selesai diuji (100%) namun yang memenuhi syarat hanya sebanyak 465 sampel (75.0%).

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industri farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi Kesehatan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan, namun harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan kompetensi	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan	Telah dilakukan pendampingan pre market oleh Poksi Pemeriksaan terhadap 7 UMKM produksi Kosmetik selama tahun 2022. Namun masih perlu dilanjutkan lagi di tahun 2023	Poksi Pemeriksaan akan lebih mengintensifkan pendampingan pre market kepada produsen Kosmetik dan obat tradisional.	Akhir tahun 2023

4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

a. ***Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan IV dengan target TW IV***

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	88	108,64	Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.**

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

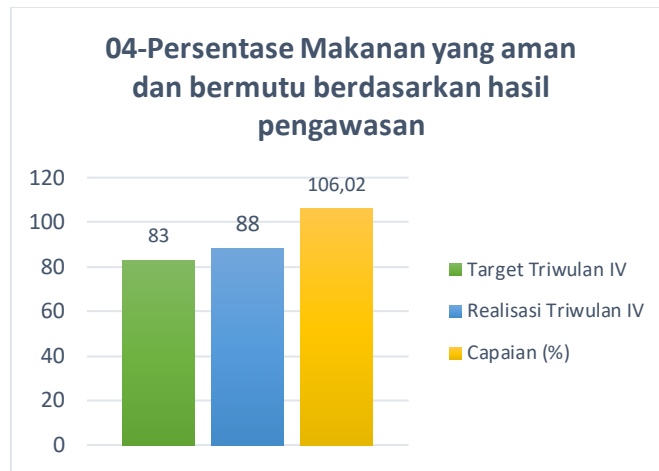
- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

#### **b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV tahun 2022**

Realisasi indikator “**Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**” pada TW IV adalah 88% dengan capaian sebesar yaitu 108,64% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, termasuk kategori “**Efektif**”. Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Triwulan IV Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan persentase capaian dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022 (capaian 105.30% dan realisasi 87.40%). Meningkatnya realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan disebabkan meningkatnya jumlah makanan yang memenuhi syarat mikrobiologi dan kimia.



Gambar 8. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2022. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Persentase capaian dan realisasi sampel makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak.

Persentase Capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 105.3%, **di atas target Triwulan II dan target tahunan tahun 2022** yang ditetapkan yaitu 83 %, dengan kriteria “**Baik**”. Pada Triwulan IV jumlah sampel pangan targeted yang masuk ke laboratorium sebanyak 225 sampel dan semuanya telah selesai uji dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 198 sampel (88.00%) dan 27 sampel makanan (12%) tidak memenuhi syarat. Jumlah sampel yang tidak memenuhi ketentuan label sebanyak 3 sampel. Sampel makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi TMS Bisphenol A (6), TMS Siklamat (3), TMS Kuning FCF(1), TMS Logam As (1); TMS Enzim diastase (1); TMS Aspartam, Sakarin, Siklamat Benzoat (1), TMS Aspartam-SiklamatBenzot (3) TMS Sulfit-Apsartam-Siklamat-Benzoat (2), TMS E.coli dan Coliform(1), TMS APM E.Coli (2), TMS Coliform (6).Pada tahun 2022 Laboratorium Pangan menerima sampel target kasus kemasan pangan dalam jumlah banyak karena rencana penetapan regulasi terkait kemasan pangan.

Pengujian kemasan pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta, khususnya di Laboratorium pangan, sehingga perlu peningkatan kemampuan uji SDM dan menambah jumlah metoda uji yang akan digunakan.

Pada Pada Triwulan IV, Laboratorium Pangan menerima surat percepatan sampling kemasan pangan PET dan pengujian sampel kajian Penetapan kadar Bisfenol A dalam produk Ikan dalam kaleng. Perlu diperhatikan kesiapan reagen dan baku pembanding serta metode Analisa yang telah diverifikasi.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Proses/Teknik sampling dan kondisi di sarana distribusi dan produsen juga mempengaruhi hasil pengujian di laboratorium. Pada Implementasi Regionalisasi di tahun 2022, Laboratorium Pangan Balai Besar POM Jakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Air dan Laboratorium spesifik Mikotoksin. Program perencanaan pengadaan alat, verifikasi metoda Analisa, bimbingan teknis internal dan eksternal, magang dan peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium yang terkait dengan pengujian Regionalisasi menjadi perhatian khusus. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas tersebut meningkatkan cost / biaya yang dikeluarkan dalam pembelian suku cadang, reagent, dan alat dalam jumlah banyak, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih baik.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023
3	Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Pemdampingan dan pengawasan UMKM Pangan dan pelaku usaha pangan lainnya	Akhir tahun 2023
4	Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan	Melakukan Bimtek Pengawasan Iklan dan penandaan	Akhir tahun 2023

**5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

**a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan IV dengan target TW IV**

Tabel 12. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	76,8	86,29	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO<sub>3</sub>, NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO<sub>3</sub> sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

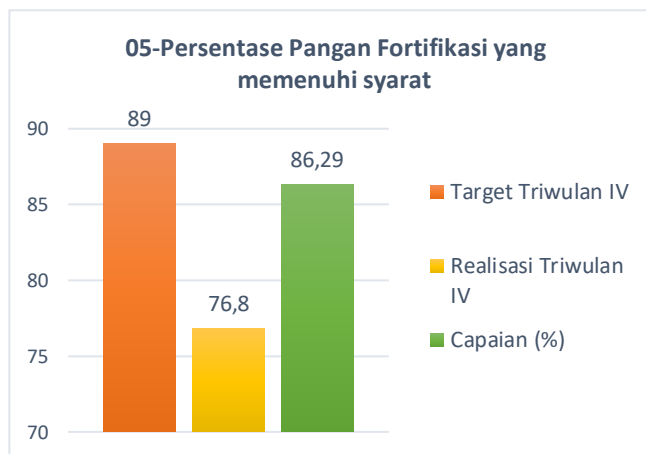
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

**b. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator **“Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”** pada TW IV adalah 76.8% dengan capaian sebesar yaitu 86.29% termasuk kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka termasuk kategori **“kurang efektif”** sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada tahun 2023.



Gambar 9. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

1. Pada tahun 2021 ini, IKU "Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat" merupakan tambahan IKS 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU "Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan".
2. Berdasarkan Pada TW IV seluruh sampel Pangan Fortifikasi telah selesai diuji. Berdasarkan evaluasi, produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebanyak 29 sampel (23.20%) yaitu 21 sampel garam dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar KIO<sub>3</sub>, NaCl dan kadar air dan 8 sampel tepung terigu. Dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar Vitamin B<sub>2</sub>, B<sub>12</sub>, dan logam Fe. Jumlah sampel garam yang tidak memenuhi syarat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 10 menjadi 21 sampel.
3. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat. Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

**d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Peningkatan Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Pada tahun 2022 mulai digunakan metode uji identifikasi Fe elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu. Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual, sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat dijamin validitasnya. Dengan

demikian hasil pengawasan post market melalui sampling dan pengujian dapat dijadikan dasar untuk Melakukan pembinaan secara lebih intensif dan pengawasan secara lebih ketat.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kemampuan uji sampel fortifikasi	Sudah dilaksanakan uji skrining awal Fe elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam.	-	Sepanjang Tahun 2023
2	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Sepanjang Tahun 2023
3.	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Sudah dilaksanakan, namun perlu lebih diintensifkan	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Sepanjang Tahun 2023

**Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

**6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.**

**a. *Matriks perbandingan target triwulan IV dengan realisasi TW IV***

**Tabel 13.** Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target TW IV	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87	87	91,04	104,64



Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) dalam memilih Obat dan Makanan. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya, dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) dengan metode dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Kriteria yang digunakan adalah:

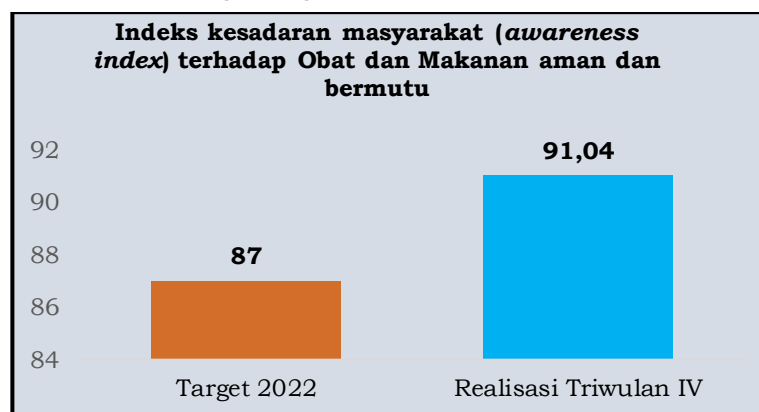
Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan IV tahun 2022 diperoleh sebesar 91,04 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target triwulan IV tahun 2022 sebesar 87,00 diperoleh capaian sebesar 104,64% dengan kategori kinerja Efektif. Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2022 merupakan capaian indeks tertinggi secara nasional dari 34 provinsi.

Adapun indeks yang diperoleh terdiri atas indeks pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebagai berikut:

- 1) Indeks pengetahuan sebesar 92,54 dengan kategori indeks Sangat Baik dan menempati urutan kedua terbesar secara nasional setelah Sulawesi Utara. Indeks ini merupakan hasil rerata dari masing-masing komoditi yaitu Obat 92,92; Obat Tradisional 90,72; Suplemen Kesehatan 91,25; Kosmetik 90,87; dan Pangan Olahan 95,51
- 2) Indeks sikap sebesar 89,05 dengan kategori indeks Baik yang merupakan rerata dari komodii Obat sebesar 89,03; Obat Tradisional sebesar 89,03; Suplemen Kesehatan sebesar 88,95; Kosmetik sebesar 88,88; dan Pangan Olahan sebesar 88,88.
- 3) Indeks perilaku sebesar 91,54 dengan kategori indeks Sangat Baik. Hasil ini merupakan indeks perilaku tertinggi bila dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya. Indeks perilaku ini merupakan hasil rerata dari komoditi Obat sebesar 92,56; Obat Tradisional sebesar 91,13; Suplemen Kesehatan sebesar 91,25; Kosmetik sebesar 90,41; dan Pangan Olahan sebesar 91,53.

**b. Perbandingan realisasi TW IV dengan target tahun 2022**



Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan IV diperoleh sebesar 91,04. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 87, nilai indeks telah melampaui target dengan capaian sebesar 104,64% dengan kategori kinerja Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Secara demografi, wilayah DKI Jakarta yang merupakan wilayah urban memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibanding wilayah rural. Akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman dan bermutu cenderung sangat mudah untuk diperoleh.
- 2) Adanya korelasi positif antara aspek pengetahuan dan perilaku. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ditunjukkan dengan nilai indeks pengetahuan yang tinggi, berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sehingga nilai indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tinggi.
- 3) Masih adanya pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mencari informasi terkait produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama mengenai Obat dan Vaksin COVID-19 dan suplemen Kesehatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
- 4) Adanya perkuatan sinergi dengan stakeholder terkait dalam pemberian penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini BBPOM di Jakarta menggandeng Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah (tingkat kota maupun provinsi), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI), akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan media melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan.
- 5) Keragaman tema materi/ pesan penyuluhan dan KIE yang disampaikan ke masyarakat yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 6) Peningkatan penggunaan media KIE dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM kepada masyarakat seperti pemanfaatan videotron yang ditampilkan di tempat-tempat umum wilayah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 7) Peningkatan konten/ materi informasi edukasi melalui media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan tagline KataBPOM, Cek KLIK, dan BPOM Mobile.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan penyuluhan dan KIE Obat dan Makanan dengan Stakeholder terkait terutama unsur penta heliks dalam pengawasan Obat dan Makanan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media.
- 2) Peningkatan strategi penyuluhan dan KIE dengan cara mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta dan memerhatikan kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, Pendidikan, dan cakupan wilayah.
- 3) Memanfaatkan media KIE yang banyak diakses masyarakat seperti media luar ruang melalui pemasangan poster, banner, dan videotron di tempat-tempat umum.
- 4) Menyusun konten/materi penyuluhan dan KIE untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, misalnya melalui infografis atau videografis mengenai nomor izin edar, bahan berbahaya, label produk Obat dan Makanan.
- 5) Menggencarkan promosi tagline KataBPOM dan Cek KLIK melalui berbagai media.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Intensifikasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui berbagai program inovasi, seperti Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta).
- 2) Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.
- 3) Gencarnya promosi Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan menggunakan tagline KataBPOM dan Cek KLIK pada materi dan infografis yang telah disusun.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan program KIE terkait semua komoditi Obat dan Makanan	Telah disusun perencanaan pelaksanaan KIE Obat dan Makanan periode tahun 2022 pada triwulan I		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Sosialisasi tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan agar masyarakat lebih sadar akan perannya dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan tahun 2022 melalui berbagai media (tatap muka, <i>zoom meeting</i> , media cetak/elektronik) sesuai perencanaan		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait Obat dan Makanan melalui berbagai program intervensi dan pendampingan pelaku usaha Obat dan Makanan pada tahun 2022		
		Pelaksanaan Pagelaran Semarak Inovasi Obat dan Makanan Punya Kite BBPOM Jakarta ( <i>Passionate Jakarta</i> ) dengan menundang berbagai <i>stakeholder</i> di Provinsi DKI Jakarta serta pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan untuk sosialisasi inovasi pelayanan publik serta sistem pengawasan keamanan Obat dan Makanan pada 22 September 2022		

**Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

**7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

**a. *Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan realisasi TW IV***

Tabel 14. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7	95,01	108,44	Memenuhi ekspekstasi

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha.

Dasar pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

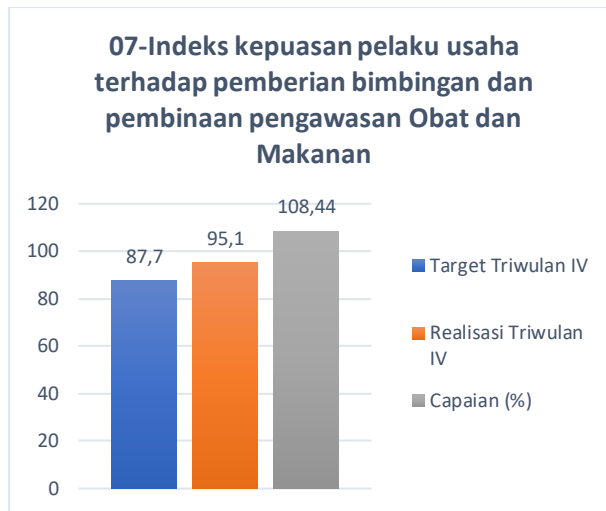
Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021

Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://surveiprkom.pom.go.id>.

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan triwulan ketiga sebesar 95,10 dan jika dibandingkan dengan target 2022 sebesar 87,7 maka capaian 108,44 %. dengan jumlah kegiatan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dan jumlah responden sebanyak 1236 (seribu dua ratus tiga puluh enam ) responden

**b. Perbandingan realisasi TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan IV diperoleh sebesar 95,01 dengan capaian 108,44 namun tetap perlu dilaksanakan pengawalan, monitoring dan evaluasi pada periode selanjutnya.



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2022 yang semula sebesar 86.5 pada tahun 2021 menjadi 87.7
2. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, baik secara luring maupun daring.

**d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha pada tahun ini Balai Besar POM di Jakarta, secara kontinu melaksanakan desk CAPA untuk perbaikan hasil audit ataupun diskusi terkait perbaikan dokumen untuk pemenuhan dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB untuk berkomunikasi kepada pelaku usaha terhadap dokumen yang telah disampaikan melalui system e-sertifikasi CPPOB
2. Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan kegiatan Kerling Jakarta dan Sultan Betawi untuk memberikan informasi bagi pelaku usaha. Kerling Jakarta merupakan kegiatan jemput bola di mana tim Balai Besar POM di Jakarta mengunjungi lokasi-lokasi kantor Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi, sedangkan untuk Sultan Betawi layanan diberikan di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi DKI Jakarta, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha.
3. Kegiatan desk registrasi yang diselenggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang pada triwulan ketiga 2022 telah diselenggarakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022, tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022, dan tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dan luring

4. Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk memperluas layanan terhadap UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha jika akan memerlukan pelayanan.
5. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Jakarta yang berda di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

**e. Tindak Lanjut lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan kegiatan pada bimtek dan pembinaan pelaku usaha	Selesai dilaksanakan dan mendapat penghargaan sebagai unit dengan kegiatan terbanyak dan unit dengan responden terbanyak Jumlah Kegiatan : 57 Jumlah Respondes : 1236	Pembuatan sistem evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan capaian sehingga kegiatan bimtek tidak bertumpuk pada TW 3 dan 4	Sepanjang Tahun 2023

**8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.**

**a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi TW IVI dengan realisasi TW IV***

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN IV TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN IV TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	76,65	76,65	80,22	104,66	Efektif

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk



layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan. Pengukuran indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

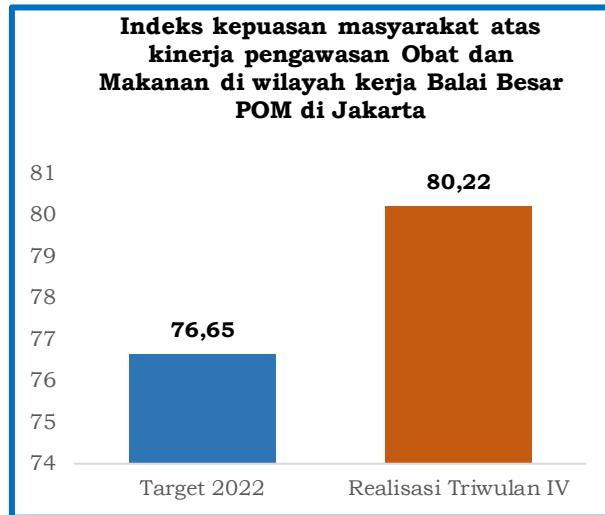
Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 ini diperoleh sebesar 80,22 dengan kategori Puas. Hasil ini sudah melampaui target Triwulan IV sebesar 76,65 dengan capaian sebesar 104,66%, dengan kriteria kinerja Efektif.

Hasil indeks per kategori produk adalah sebagai berikut: Obat sebesar 80,24; Obat Tradisional sebesar 80,09; Suplemen Kesehatan sebesar 80,20; Kosmetik sebesar 80,13; dan Pangan Olahan sebesar 80,05. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat per variabel, yaitu pengawasan sebesar 78,80; penindakan sebesar 82,10; pemberian informasi sebesar 79,18; dan jaminan keamanan sebesar 80,80

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV target tahun 2022**



Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Nilai realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Triwulan IV sebesar 80,22 dengan kategori Puas. Apabila dibandingkan dengan target indeks tahun 2022 sebesar 76,65 diperoleh capaian sebesar 104,66%, dengan kriteria kinerja Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Beberapa faktor penyebab capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih adanya kondisi pandemi COVID-19 secara tidak langsung menjadi salah satu faktor BPOM lebih dikenal masyarakat melalui informasi keamanan vaksin, pemberian izin EUA (emergency used authorization), informasi mengenai Obat COVID-19, Suplemen Kesehatan, dan Obat Tradisional untuk peningkatan daya tahan tubuh di masa pandemi dan penyediaan laboratorium untuk pengujian COVID-19 serta penyuluhan terkait Obat dan Vaksin. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat serta diikuti oleh ekspektasi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi.
- 2) Intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan subsite dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.

- 3) Publikasi hasil kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, yaitu koran, radio, videotron, dan media sosial (Twitter, Instagram, dan Facebook) yang mudah diakses masyarakat.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja pada periode mendatang meliputi:

- 1) Peningkatan publikasi terkait kinerja pengawasan dengan pesan utama BPOM melindungi masyarakat melalui berbagai media publikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan lebih memerhatikan kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, Pendidikan, dan cakupan wilayah sehingga materi dapat lebih mudah dipahami masyarakat.
- 3) Peningkatan KIE secara aktif kepada masyarakat terhadap bahan-bahan berbahaya yang mungkin disalahgunakan pada Obat dan Makanan

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Intensifikasi penerapan inovasi peningkatan kinerja, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung dari kinerja pengawasan BBPOM di Jakarta.
- 2) Terselenggaranya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti intensifikasi pengawasan dan Razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, dan produk ilegal serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.
- 3) Penerapan inovasi portal Jakdigital sebagai sarana akses informasi publik dan hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui <https://bbpomjakarta.id>

e. *Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta serta pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.	Publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, baik media cetak/elektronik maupun media sosial.		

9. **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

a. *Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target triwulan IV*

Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	96,03	105,53	Memenuhi Ekspekstasi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{(I_i - I_{\min})}{(I_{\max} - I_{\min})} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

- $I_i$  = skor faktor ke-i  
 $I_{\min}$  = skor faktor minimal  
 $I_{\max}$  = skor faktor maksimal  
 $n$  = banyaknya responden

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 diperoleh sebesar 96,03 dengan kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan target Triwulan IV sebesar 91,00 diperoleh capaian sebesar 105,53% dengan kriteria kinerja Efektif. Nilai indeks ini diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap 251 responden.

Nilai indeks ini dieproleh dari Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan pada BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		Nilai
U1	Persyaratan	94,62
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	94,62
U3	Waktu Penyelesaian	95,84
U4	Biaya/Tarif	95,88
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,75
U6	Kompetensi Pelaksana	96,88

U7	Perilaku Pelaksana	97,41
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,61
U9	Sarana dan Prasarana	96,68
Nilai		<b>96,03</b>

Dari nilai per unsur diketahui bahwa unsur pelayanan perilaku pelaksana memperoleh nilai tertinggi sedangkan unsur persyaratan dan sistem, mekanisme, dan prosedur memperoleh nilai terendah.

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis pelayanan dan per unsur pelayanan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Pengujian	100,00	100,00	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	<b>98,77</b>
Layanan Informasi dan Pengaduan	94,58	94,58	95,83	95,85	95,72	96,85	97,39	96,65	96,65	<b>96,01</b>

**b. Perbandingan realisasi TW IV dengan target tahun 2022**



Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 diperoleh sebesar 96,03 dengan kategori Sangat Baik. Hasil ini telah melampaui target tahun 2022 sebesar 91,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 105,53% dengan kriteria Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berikut ini penyebab keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemberian layanan publik BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal baik secara tatap muka maupun secara online dengan melalui Whatsapp, media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter) dan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Telah diadakannya konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.
- 3) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta melalui media cetak koran, media sosial dan tayangan media luar ruang seperti banner dan videotron yang mudah diakses masyarakat.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana BBPOM di Jakarta sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan yang mudah diakses dan transparan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- 1) Peningkatan akses layanan informasi berbasis digital baik melalui subsite maupun portal Jakdigital.
- 2) Diadakannya sosialisasi mengenai ruang lingkup parameter uji kepada penerima layanan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan rencana aksi tindak lanjut (RATL) terhadap pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2022 serta monitoring dan evaluasi terhadap RATL yang dilakukan per triwulan sebagai komitmen BBPOM di Jakarta dalam memberikan pelayanan prima dan memperbaiki kinerja secara terus-menerus.
- 2) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan sertifikasi dan layanan informasi obat dan makanan yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mengingat adanya masukan dari hasil SKM periode sebelumnya bahwa lokasi kantor BBPOM di Jakarta sulit untuk dijangkau.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi	Pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik dalam pengelolaan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang baik sehingga aliran informasi dapat lebih persuasif.	informasi, media social, dan komunikasi serta workshop pelayanan publik prima.		
	Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.	Diadakannya e-kiosk sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media Instagram, Facebook, dan Twitter BBPOM di Jakarta		
	Melakukan kaji ulang terkait dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak stakeholder untuk mendapatkan saran perbaikan melalui Forum Konsultasi Publik.	Telah diadakan Forum Konsultasi Publik untuk melakukan kaji ulang dan penetapan standar pelayanan dengan masukan dari berbagai kalangan, meliputi perwakilan asosiasi, perwakilan akademisi, perwakilan pengguna layanan, dan lintas sektor terkait pada 22 September 2022.		
	Sosialisasi prosedur/alur pelayanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.	Diadakannya e-kiosk sebagai salah satu sarana untuk penyampaian informasi kepada pelanggan, selain itu juga penyampaian informasi secara masif melalui media Instagram, Facebook, dan Twitter BBPOM di Jakarta		
	Melakukan kaji ulang terkait timeline yang ditetapkan secara internal.	Dilakukan kaji ulang dan revisi terhadap timeline pelayanan publik pada SOP Mikro		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar pelayanan dengan realisasi pelaksanaan pelayanan.	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan publik (layanan informasi dan pengaduan) per triwulan		



**Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

**10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV Tahun 2022**

Tabel 17. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	102,83	114,26	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain, Pelaku usaha dan Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

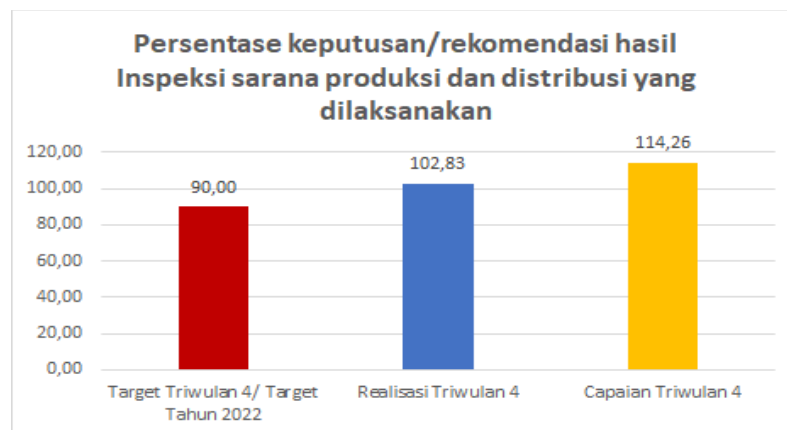
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =  $(A+B+C+D)/4$ . Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%
- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain. Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%
- Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT  
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

**b. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator “**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**” pada TW IV adalah 102,83% dengan capaian sebesar yaitu 114,26% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka sudah termasuk kategori “**Efektif**”



Gambar 10. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.

- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan sudah sesuai.
- Kecepatan respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sudah meningkat karena BBPOM di Jakarta aktif melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/ belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mendorong tindak lanjut dari BPOM pusat terkait rekomendasi inspeksi yang dilaksanakan pusat	Sudah dilaksanakan	Tindak lanjut dari pusat akan ditunggu sampai akhir TW IV karena terkait keterlambatan respon	Sepanjang Tahun 2023

**11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV Tahun 2022**

Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79,93	101,18	Memenuhi Ekspektasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

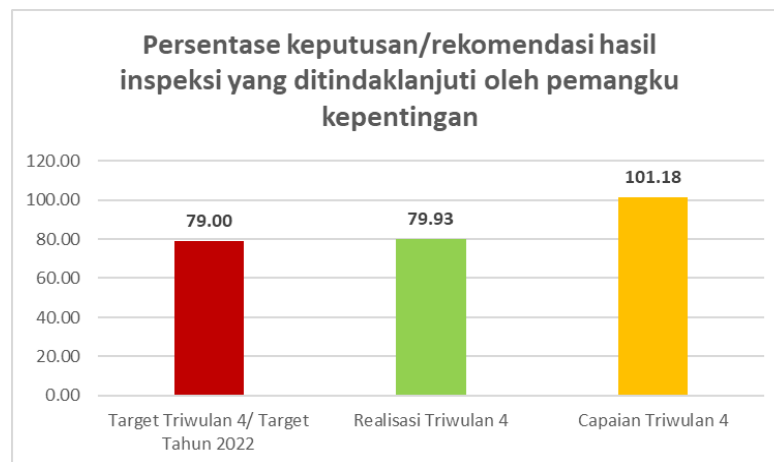
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Persentase capaian TW IV sebesar 101,18% (realisasi 79,93 % dari target 79 %) dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” dengan kesimpulan “**Efektif**”. Hal ini disebabkan respon dari pemangku kepentingan terhadap surat rekomendasi dari BBPOM di Jakarta



Gambar Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- Semakin sedikit jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin rendah capaian indikator kinerjanya.
- Semakin sedikit tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin rendah juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait menggunakan aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta, tetapi aplikasi ini harus diapproved BPOM Pusat sehingga menyebabkan belum adanya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Kurang dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan misalnya sarana IFP/IFK dan sarana distribusi lain di wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mendorong respon tindak lanjut dari pihak sarana terhadap surat yang diterbitkan BBPOM di Jakarta	Dalam Progress	CAPA sarana yang dihitung selain CAPA yang disampaikan via surat resmi, dihitung juga yang disampaikan via email walaupun tanpa surat resmi, juga CAPA yang diselesaikan (closed) di sarana saat pemeriksaan	Sepanjang tahun 2023

**12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan target TW IV**

Tabel 19. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	97,8	112,41	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK

(7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

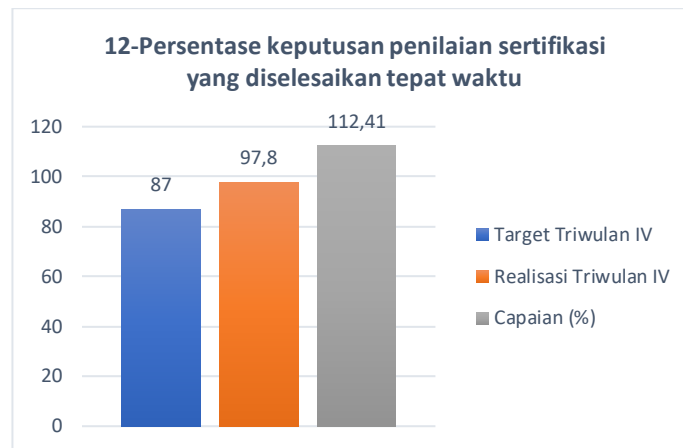
Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan empat tahun 2022 sebanyak 97,80 % dari target yang ditetapkan 87 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan dua tahun 2022 sebesar 112,41% dengan kriteria “sangat baik”.

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan empat 2022 sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan ). Sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan ) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2022 dan 50 (lima puluh ) merupakan keputusan dari permohonan tahun sebelumnya. Dari 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) keputusan memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan 18 (delapan belas) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Permohonan yang diterima sampai triwulan tiga tahun 2022 sejumlah 742 (tujuh ratus empat puluh dua) dan masih terdapat permohonan yang diterima tahun 2022 akan diselesaikan di tahun 2023 sebanyak 54 (lima puluh empat). Adanya permohonan yang diterima tahun 2022 yang akan diselesaikan tahun 2023 karena pelaku usaha belum menyelesaikan tindakan perbaikan atas audit yang dilakukan dan karena terdapat permohonan yang diterima di akhir tahun sehingga akan diaudit tahun 2023. Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan empat tahun 2022 sebanyak 81 (empat puluh sembilan) dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator “**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**” pada TW IV adalah 97,8% dengan capaian sebesar yaitu 112,41% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.

Jika disimpulkan termasuk kategori “Efektif” namun tetap diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi realisasi untuk mempertahankan capaian periode selanjutnya.



Gambar 12. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (Online Single Submission) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2021 yang lalu merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan berlakunya system yang baru ini masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dan bingung bagaimana mengatasinya. Begitu juga dengan petugas



**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa kegiatan di tahun 2022 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain:

- a. Balai Besar POM di Jakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta
- b. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
- c. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan desk CAPA dan desk CPPOB diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. *Desk CAPA* dan desk CPPOB sampai dengan triwulan tiga 2022 telah diselenggarakan sebanyak tujuh kali dengan data sebagai berikut:
  - d. Di samping itu pelayanan prima dalam bentuk Desk CAPA dan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen izin penerapan CPPOB BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Sampai dengan triwulan tiga desk registrasi telah dilaksanakan sebanyak 6 kali baik secara daring maupun luring. Setelah kegiatan tersebut sampai triwulan ketiga telah diterbitkan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Nomor Izin edar (NIE) pangan olahan.
  - e. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu. Adapun pelaksanaan kerling sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Lokasi
1	10 Agustus 2022	Kantor Walikota Jakarta Pusat
2	11 Agustus 2022	Kantor Walikota Jakarta Utara
3	24 Agustus 2022	Kantor Kecamatan Duren Sawit
4	1 September 2022	RPTRA Manunggal
5	22 September 2022	Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta

- f. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
- g. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

- Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan
- Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha
- Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penarapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Selesai Permohonan masuk : 742, rekomendasi permohonan tahun lalu yg keluar 2022 : 50 dan sampel pihak ketiga : 81 Masih terdapat yang tidak tepat waktu sebanyak 18 rekomendasi. Hal ini disebabkan beban kerja di Sertifikasi dan pada saat yang bersamaan banyak masuk permohonan yang harus ditindaklanjuti	Pengawasan melekat dan menciptakan reward dan punishment terhadap yang tepat waktu dan tidak tepat waktu	Triwulan IV

13. **Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.**

a. ***Perbandingan target dan realisasi TW IV Tahun 2022***

Tabel 20. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	71,31	113,19	Memenuhi Ekspektasi

*Sarana Produksi Obat*

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

*Sarana Produksi OT*

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

*Sarana Produksi Kosmetik*

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

#### *Sarana produksi Suplemen Kesehatan*

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

#### *Sarana Produksi Pangan*

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

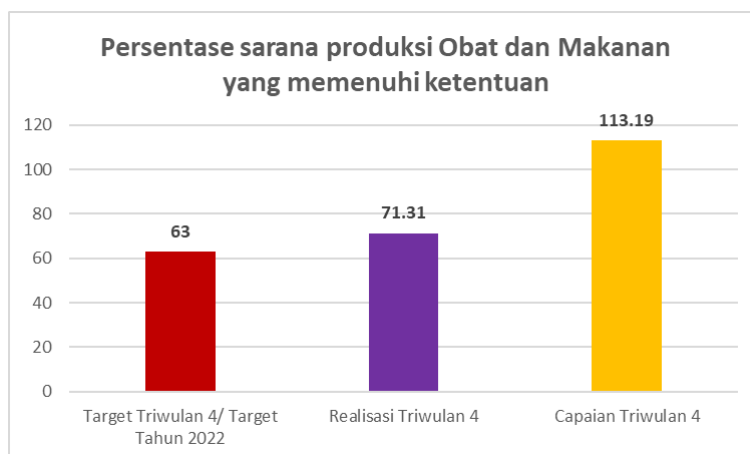
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

#### **b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw IV tahun 2022**

Realisasi indikator “**Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**” pada TW III adalah 71,31% dengan capaian sebesar yaitu 113,19% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 63% dengan capaian tahun 2022 yaitu 113,19% jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM No.128 Tahun 2022 termasuk kategori “**Efektif**”



Gambar 13. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 71,31 % **sudah melebihi target** yang ditentukan (63%). Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan TW IV tahun 2022 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	22	18	4
2.	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3.	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	8	8	0
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	10	7	3
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	34	29	5
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	3	1
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	2	2	0
9.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	5	2	3
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
	Suplemen Kesehatan			
11.	Industri Kosmetik	44	36	8
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13.	Industri Pangan	160	125	35
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	77	31	46
<b>TOTAL</b>		<b>366</b>	<b>261</b>	<b>105</b>

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- ✓ Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan dan juga di Industri Pangan, karena tahun 2022 ini mayoritas industri pangan yang diperiksa adalah dari kategori pangan UMKM yang mendapat program fasilitasi MD.
- ✓ Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya dan kendala perekonomian.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM.
- ✓ Kemampuan Sumber daya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun selanjutnya:

- ✓ Pelatihan aspek GMP misal pelatihan Food Inspektur dll untuk petugas Balai untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman petugas

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik,

industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan inspektur GMP. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelatihan peningkatan kapasitas inspektur pangan	Sudah dilaksanakan	Tindak lanjut terus menerus akan dilaksanakan secara berkala	-

**14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**a. *Perbandingan target dan realisasi TW IV tahun 2022***

Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	84,22	112,29	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

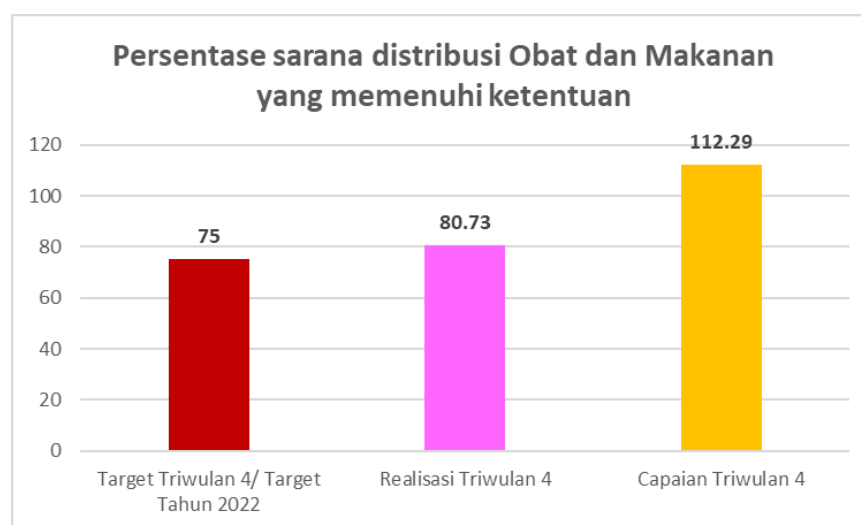
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

**b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target 2022**

Target indikator “**Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**” pada TW IV ini adalah 75% dengan realisasi indikator pada TW IV sebesar 84.22 % dengan capaian sebesar yaitu 112,29% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 75% dengan capaian tahun 2022 yaitu 112,294% jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM No.128 Tahun 2022 termasuk kategori “**Efektif**”. Hal ini dipengaruhi oleh makin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam mematuhi regulasi yang ada



Gambar 14. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**



Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

Tabel 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan IV di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	114	89	25
2.	Apotek	171	151	20
3.	Toko Obat	84	76	8
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	7	0
5.	Rumah Sakit (RS)	75	69	6
6.	Puskemas	94	92	2
7.	Klinik	89	59	30
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	139	128	11
11.	Fasilitas Distribusi Suplemen	39	30	9
12.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	250	194	56
13.	Klinik Kecantikan	0	0	0
14.	Fasilitas Distribusi Pangan	478	402	76
<b>TOTAL</b>		<b>1540</b>	<b>1297</b>	<b>243</b>

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat

- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.
- Intensifnya pemeriksaan sarana pengelola vaksin Covid-19 (Puskesmas dan RS) sehingga kepatuhan juga meningkat

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan produk tanpa izin edar, rusak, kedaluwarsa maka diberikan sanksi Peringatan Keras dan produk dimusnahkan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan sistem online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tindak lanjut pola pemeriksaan sarana distribusi secara rutin terhadap sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Sudah dilaksanakan	Tindak lanjut terus menerus akan dilaksanakan secara berkala	Sepanjang tahun 2023

15. **Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.**

a. **Perbandingan target triwulan IV dengan target TW IV**

Tabel 22. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,3	109.77	Memenuhi Ekspekstasi

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%)

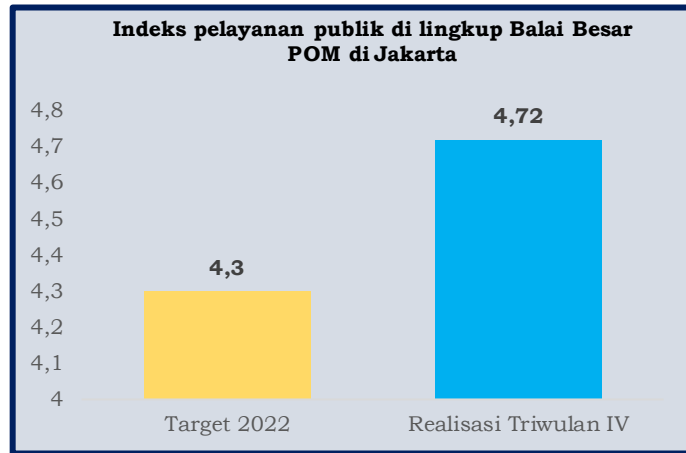
Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Hasil penilaian internal indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 4,72 dengan kategori A, Pelayanan Prima. Hasil ini sudah melampaui target

Triwulan IV tahun 2022 sebesar 4,30 dengan nilai capaian sebesar 109,77%, kriteria kinerja Efektif. Dengan hasil ini, BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai Pelayanan Prima dan menjadi 5 (lima) besar UPP UPT BPOM terbaik tahun 2022 setelah BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Surabaya, dan BBPOM di Serang.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022**



Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta Triwulan IV diperoleh sebesar 4,72 dengan kategori A, Pelayanan Prima. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 4,30, diperoleh capaian kinerja sebesar 109,77% dengan kriteria kinerja Efektif..

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Faktor-faktor penyebab keberhasilan diperolehnya capaian indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 antara lain:

- 1) Telah tersedia standar pelayanan publik yang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Jakarta.
- 2) Standar pelayanan publik telah disosialisasikan dan dipublikasi kepada masyarakat baik melalui media cetak seperti koran, banner, poster maupun media elektronik melalui media sosial dan portal inovasi Jakkdigital yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan standar pelayanan publik dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat seperti pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, dan LSM.
- 4) Telah dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat secara rutin dan berkala per bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap SKM dan masukan dari pengguna layanan sebagai saran perbaikan per triwulan.
- 5) Telah dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan publik terutama yang ramah untuk disabilitas seperti tersedianya buku layanan publik dengan huruf Braille.

6) Telah dilakukan implementasi berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Sultan Betawi (Konsultasi Layanan Informasi Sertifikasi Bersama Balai Besar POM Wilayah DKI), Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta) melalui <https://bbpomjakarta.id>.

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian internal terhadap peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta periode mendatang, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan SKM per jenis layanan dan tindak lanjut SKM.
- 2) Menampilkan profil petugas pelayanan publik pada subsite.
- 3) Meningkatkan pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite.
- 4) Meningkatkan arsip proses konsultasi dan pengaduan yang didokumentasi dan mudah diakses masyarakat.

d. **Tindak program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**  
Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- 1) Intensifikasi pemanfaatan subsite dan media sosial sebagai sarana publikasi dan layanan yang tidak terbatas waktu dan tempat.
- 2) Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik melalui workshop pelayanan publik prima kepada seluruh pegawai dan bimtek pengelolaan media sosial bagi petugas pelayanan publik.

e. **Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sistem apresiasi terhadap petugas pelayan publik berupa pemberian reward serta punishment sebagai sanksi apabila standar pelayanan publik tidak terlaksana dengan baik perlu diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM pelayanan publik.	Implementasi pemberian reward kepada petugas pelayanan publik terbaik setiap bulannya serta kebijakan punishment apabila petugas pelayanan publik tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar		
2	Inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta	Berbagai inovasi peningkatan layanan baik secara tatap muka maupun digital telah diterapkan guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat, yaitu melalui implementasi inovasi Sultan Betawi (Konsultasi Layanan Informasi Sertifikasi Bersama		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
		Balai Besar POM Wilayah DKI), Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta) melalui <a href="https://bbpomjakarta.id">https://bbpomjakarta.id</a>		
3	Penerapan kebijakan pelayanan publik secara konsisten dengan perbaikan yang terus-menerus melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.	Penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik BBPOM di Jakarta yang telah dikaji ulang dalam Forum Konsultasi Publik serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan survei kepuasan masyarakat secara periodik	Tindak lanjut terus menerus akan dilaksanakan secara berkala	Sepanjang tahun 2023

**16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

**a. Perbandingan target triwulan IV dengan target TW IV**

**Tabel 24.** Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

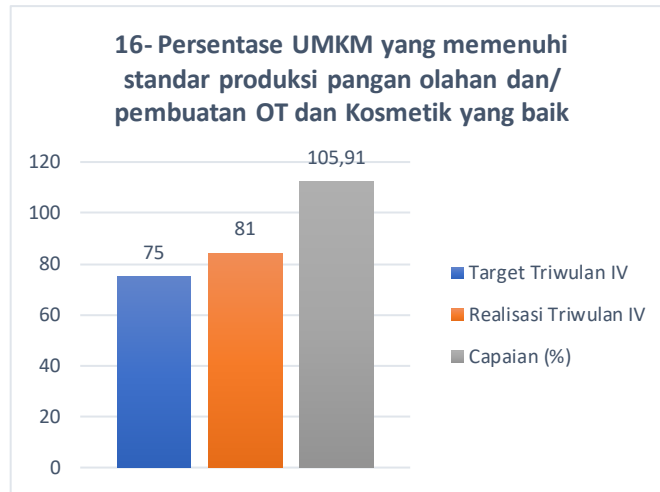
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	100	Memenuhi Ekspekstasi

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Target indikator “**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**” pada TW IV ini adalah 77% dengan realisasi indikator pada TW IV sebesar 77% dengan capaiannya yaitu 100% termasuk kriteria “**Memenuhi Ekspekstasi**”.



Gambar 15. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta diantisipasi dengan membuat inovasi baru yaitu jak officer yang merupakan perpanjangan tangan untuk menjangkau UMKM yang akan berusaha di bidang obat makanan. Pada triwulan IV telah diangkat jak officer sebanyak 700 (tujuh ratus) personil.

Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Jakarta
- Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2022

- Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak peaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD)
- Adanya kegiatan faslitasi UMKM produksi obat tradisional dan produksi kosmetik yang mulai diadakan tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM Pangan yang dapat difasilitasi
- Untuk mengatasi terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta melakukan pembentukan fasilitator yang merupakan pendamping JakPreneur dari Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta.
- Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak peaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan beskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Balai Besar POM di Jakarta telah menginisiasi audiensi dan Forum Grup Dissussion (FGD) untuk melakukan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta.	Selesai Capaian agak terkendala pada Obat Tradisional karen fasilitasi registrasi produk belum sejalan dengan fasilitasi Sarana Capaian besar pada Kolaborasi dengan Dinas PPKUKM karena ada bantuan biaya pengujian dan registrasi produk dari Pemda	Melakukan fasilitasi UMKM dimulai lebih awal Koordinasi percepatan pemenuhan capaian fasilitasi UMKM Kosmetika dan Obat Tradisional	

**Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

**17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**a. *Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan target TW IV***

Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,4	95,06	100,70	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BBPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Efektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator pemahaman memiliki indeks tertinggi sebesar 96,12 diikuti oleh indikator manfaat sebesar 95,57, kemudian indikator ragam kegiatan sebesar 92,97 dan indikator minat sebesar 92,45. Nilai indikator pemahaman yang tinggi menandakan tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima dari kegiatan KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta sudah baik.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022**

Relisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta triwulan IV tahun 2022 diperoleh sebesar 95,06 (Sangat Efektif Sekali). Apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar 94,4, nilai realisasi telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,70% dengan kriteria kinerja Efektif.



Gambar 16. Gambar Perbandingan Realisasi TW III dibandingkan dengan Target TW III dan Target Tahun 2022 pada IKU Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BBPOM di Jakarta Triwulan IV tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya perkuatan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dengan stakeholder terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, OPD, dan media.
- 2) Terselenggaranya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, sebanyak penambahan 1 (satu) titik di Wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 250 orang pada periode Triwulan IV dengan metode KIE tatap muka. Secara total sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat sebanyak 23 titik dengan jumlah peserta sebanyak 5750 orang. Hasil ini telah melampaui target peserta KIE dengan Tokoh Masyarakat sebanyak 5500 orang.



Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat

- 3) Terselenggaranya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan berbagai tema/ pesan materi seperti Keamanan dan Mutu Obat, Keamanan Pangan, KIE dalam rangka Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik secara daring maupun tatap muka dengan target audiens ibu rumah tangga, masyarakat umum, dan pelajar.



Gambar 2 KIE dalam rangka Kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

- 4) Terselenggaranya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia yang melibatkan unsur penta heliks berasal dari pemerintah/lintas sektor, media, tokoh masyarakat, akademisi dan pelaku usaha.



Gambar 3 KIE terkait bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia dengan melibatkan unsur penta heliks

- 5) Terselenggaranya rangkaian kegiatan sosialisasi keamanan pangan melalui tahapan kegiatan pada program prioritas nasional Desa Pangan Aman dan Program, PJAS aman, dan Pasar Pangan Berbasis Komunitas melalui tahapan pengawalan.
- 6) Narasumber BBPOM di Jakarta pada berbagai kegiatan dengan stakeholder, misalnya Penyuluhan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), keamanan pangan serta label pangan kepada pelaku usaha pangan dan masyarakat.
- 7) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan indikator tingkat minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan, dapat dilakukan upaya penganeekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Peningkatan strategi pelaksanaan KIE dengan lebih mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah.

***d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II tahun 2022 ini antara lain:

1. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat

- dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat
2. Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat.
  3. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).
  4. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial dan sms blast

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Diperlukan upaya upaya penganekaragaman media penyampaian KIE seperti media cetak, media elektronik (radio, iklan layanan masyarakat di televisi, videotron), dan media social, memperbanyak topik atau tema KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui berbagai macam media seperti media cetak koran, media elektronik (talk show dan iklan layanan masyarakat di radio, videotron di berbagai tempat umum di wilayah DKI Jakarta, seperti shelter TransJakarta, jalan arteri), dan media sosial BBPOM di Jakarta		Desember 2022

**18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan target TW IV**

Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65	65	100,00	Memenuhi Ekspektasi

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk

mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

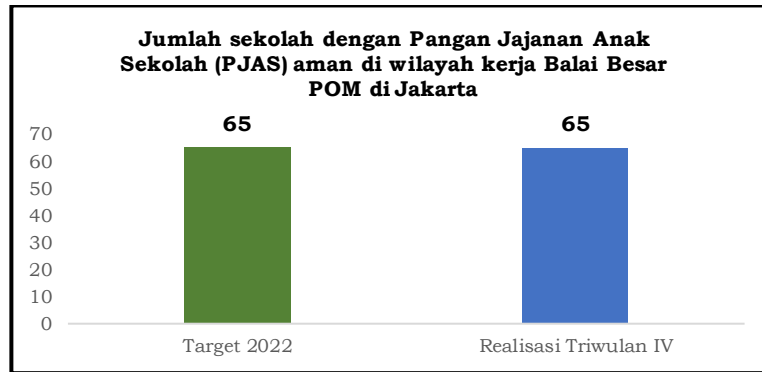
- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar **90%** dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022, Sosialisasi Keamanan Pangan pada 27 dan 30 Mei 2022, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada 20 Juni 2022, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan proses tahapan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. Target *progress* capaian tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan III tahun 2022 adalah **90%**, sehingga diperoleh **capaian sebesar 100,00% dengan kriteria kinerja Efektif**. Realisasi tahunan dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS aman seperti dijelaskan di atas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
Total Skor		100%	

**b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022**



Gambar Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada Triwulan IV diperoleh sebanyak 65 sekolah dengan progress tahapan 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebanyak 65, maka realisasi ini sudah sesuai dengan capaian 100,00%, kriteria kinerja Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Tercapainya target kinerja program intervensi PJAS pada Triwulan IV tahun 2022 ini disebabkan oleh adanya peningkatan koordinasi yang dilakukan secara kontinu dengan pemerintah daerah kota Administrasi Jakarta Selatan, OPD terkait dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan sekolah-sekolah intervensi PJAS sehingga pelaksanaan tahapan intervensi, yaitu pengawalan dapat berjalan sesuai perencanaan.

Sebagai rekomendasi pelaksanaan program intervensi PJAS aman pada periode selanjutnya ialah dapat dilakukan perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah lokus intervensi selanjutnya melalui kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan menjabarkan kriteria sekolah untuk intervensi PJAS serta program lintas sektor yang dapat diintegrasikan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program penunjang keberhasilan capaian kinerja program intervensi PJAS pada Triwulan IV tahun 2022 antara lain telah terbentuknya forum komunikasi dengan sekolah-sekolah intervensi tahun 2020-2022 melalui Whatsapp yang memudahkan dalam komunikasi serta koordinasi terkait pelaksanaan tahapan intervensi PJAS aman.



**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan koordinasi mengenai kegiatan pengawalan melalui Whatsapp group sehingga sekolah dapat mempersiapkan waktu dan pelaksanaan dapat sesuai perencanaan	Telah dilakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah intervensi tahun 2020-2021 dan pengawalan melalui mobil laboratorium keliling pada periode triwulan IV sesuai perencanaan.		Desember 2022

**19. Jumlah desa pangan aman**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan target TW IV**

Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	21	21	100	Memenuhi Ekspektasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2022 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 21 kelurahan yang meliputi 7 kelurahan intervensi baru dan 14 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020-2021. Realisasi tahunan dihitung dari jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)



No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) - Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/ survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	10%	November-Desember (TW 4)
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawasan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
Total Skor		100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan III tahun 2022 ialah sebesar **75%** dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022, telah diadakannya paket informasi keamanan pangan, *rapid test*, dll, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan pada 30-31 Maret 2022, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan *Pre* Intervensi, Survei *Pre* Intervensi dan Bimtek Komunitas pada periode Juli 2022, Fasilitas Keamanan Pangan pada periode Juli-September 2022 serta Pengawasan dengan Pengambilan dan Pengujian Sampel pada September 2022. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah melampaui **target Triwulan III sebesar 65% dengan capaian 115,38% kriteria kinerja Efektif.**

**b. Perbandingan realisasi kinerja TW IV dengan target tahun 2022**



Gambar 18. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Jumlah desa pangan aman

Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan IV tahun 2022 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Desa Pangan Aman terhadap target 21 kelurahan

(7 kelurahan intervensi tahun 2022 dan 14 kelurahan intervensi tahun 2020-2021 dalam rangka pengawalan). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan IV yaitu 21 desa dengan progress tahapan 100% dengan capaian 100% (kriteria kinerja Efektif). Realisasi jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan IV diperoleh sebanyak 21 desa/kelurahan dengan progress tahapan 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebanyak 21, maka realisasi ini sudah sesuai dengan capaian 100,00%, kriteria kinerja Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Tercapainya target kinerja program Desa Pangan Aman pada Triwulan IV ini yaitu adanya komunikasi terus-menerus dan sinergi yang baik dengan kelurahan yang diintervensi program Desa Pangan Aman melalui forum komunikasi Whatsapp sehingga pelaksanaan tahapan program sesuai dengan perencanaan. Selain itu, telah terbentuknya 15 orang Kader dari setiap kelurahan yang diintervensi menjadi total 105 kader yang telah dilatih memudahkan dalam menyebarkan informasi dan melakukan tahapan intervensi Desa Pangan Aman.

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai lokus intervensi melalui Audiensi dan Advokasi serta melibatkan OPD terkait keamanan pangan, mengingat program Desa Pangan ini merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Sudinkes, Sudin PPKUKM, Sudin KPKP, dan Sudindik. Selain itu, perlu dilakukan oemantauan terhadap rencana aksi yang telah disusun kelurahan intervensi sebagai monitoring dalam kegiatan pengawalan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Diperlukan analisis terhadap hasil pelaksanaan intervensi terhadap hasil pengujian sampel pre- dan post- intervensi sebagai evaluasi pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman Tahun 2022	Telah dilakukan analisis hasil intensifikasi pengawasan pre- dan post-intervensi yang disajikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.		Desember 2022

## 20. Jumlah pasar aman pangan berbasis komunitas

### a. *Perbandingan target triwulan IV dengan target TW IV*

Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	3	100	Memenuhi Ekspekstasi

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada monev Tahap 1 dibandingkn tahap 2

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ialah 3 (tiga) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2021. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Pengawasan	10%	Februari-Oktober (TW 1-TW 4)
Total Skor		100%	

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan IV tahun 2022 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 3 pasar intervensi (1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawasan intervensi tahun 2020-2021). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan IV sebesar 100% telah mencapai target yaitu 100% dengan capaian 100.00%



Gambar 19. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Faktor- Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas adalah adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya dalam penyelenggaraan program intervensi melalui forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan audiensi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah lokus intervensi dan Perumda Pasar Jaya untuk menentukan pasar intervensi yang sesuai kriteria sehingga dapat dilakukan kegiatan surevi pasar yang memadai.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tahapan intervensi selanjutnya.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilaksanakan tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) dengan didahului oleh koordinasi dengan pengelola pasar.	Telah dilaksanakan koordinasi, dan monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) kepada Pasar Lenteng Agung pada triwulan IV sesuai perencanaan.		

**Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6**

**21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan target dan realisasi TW IV dengan tahun 2022**

Tabel 29. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,52	99,52	Belum Memenuhi Ekspektasi

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
  - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
  - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
  - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
  - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

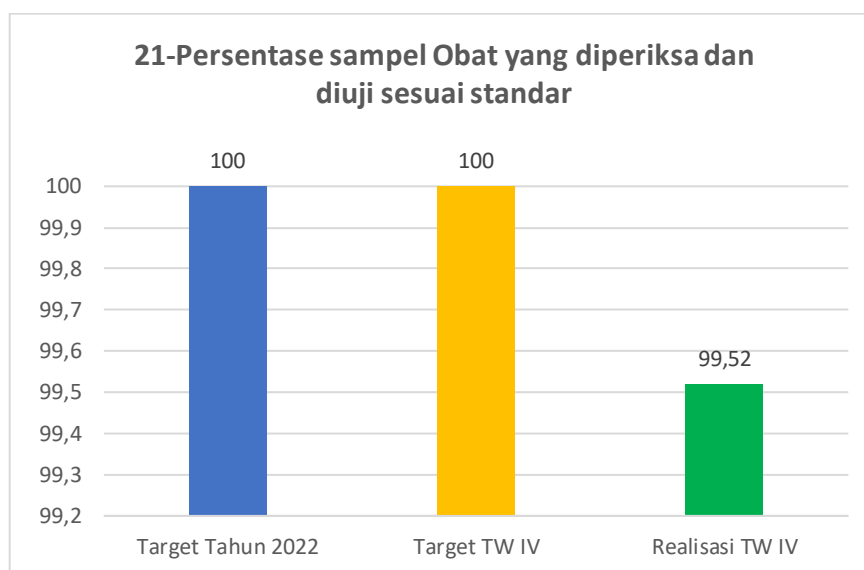
Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV tahun 2022**

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.52% termasuk kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 , maka disimpulkan termasuk kategori “Kurang efektif” sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk periode mendatang. Target indikator “Persentase persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji

sesuai standar” pada TW IV ini adalah 100% dengan realisasi indikator pada TW IV sebesar 99.52% dengan capaiannya yaitu 99.52% termasuk kriteria “Belum memenuhi ekspektasi ”, maka termasuk kategori “Kurang efektif” dibutuhkan realisasi untuk mempertahankan capaian pada periode berikutnya.



Gambar 20. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Realisasi persentase mengalami kenaikan sedangkan capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan IV Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW III, karena target yang ditetapkan untuk tiap triwulan adalah persentase terhadap jumlah target sampel tahunan. Dalam hal ini penetapan target triwulan I, II, dan III berdasarkan perkiraan jumlah sampel yang diuji sampai triwulan berjalan (kumulatif) yang realisasinya dapat lebih kecil atau lebih besar dari target. Capaian final adalah Capaian di triwulan IV.

Terdapat penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2022 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut. Sampel yang diterima sampai akhir tahun 2022 sebanyak 2285 sampel (dari target 2245 sampel). dan sudah selesai uji sebanyak 2285 sampel (100%), namun yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 2263

sampel (99.52%), karena terdapat 18 sampel yang melewati timeline pengujian dan 4 sampel yang tanpa izin edar (TIE) sehingga tidak diuji di laboratorium.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kemampuan laboratorium dalam memenuhi ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian serta Juknis Regionalisasi terkait parameter uji yang harus dilakukan, juga oleh pemenuhan timeline pengujian, sehingga hal-hal yang dapat mendukung terpenuhinya Kemampuan tersebut tentu akan menunjang keberhasilan kegiatan. Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun perlu dilaksanakan terus secara berkelanjutan dan konsisten	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023

## 22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan realisas capaian TW IV dengan target TW IV

Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,83	99,83	Belum Memenuhi Ekspektasi

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota) Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		$= \frac{A + B}{2}$
A	$= \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}} \times 100\%$	
B	$= \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$	

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :

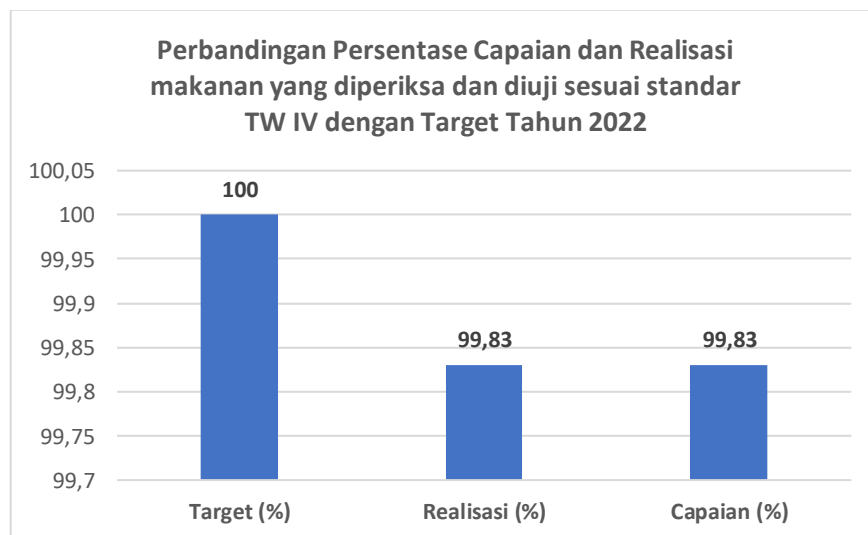
- a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
- b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling

2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

- a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
- b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

**b. Grafik perbandingan realisasi dan capaian TW IV tahun 2022**



Gambar 21. Gambar Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target indikator "**Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**" Capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta mencapai target yang ditetapkan yaitu 99.83% dengan kriteria "belum memenuhi ekspektasi", sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada periode selanjutnya pada tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Capaian di Triwulan IV kurang dari 100 % karena terdapat beberapa sampel yang hasil ujinya TMS sehingga memerlukan waktu lebih dari 30 hari kerja untuk menyelesaikan sampai konfirmasi hasil ujinya. Penyebab lainnya adalah adanya alat yang masih dalam proses perbaikan sehingga penyelesaian pengujian sampel melebihi timeline pengujian.

Banyaknya sampel kasus yang menjadi isu eksternal dan internal akhir-akhir ini, termasuk juga pengujian kemasan pangan polikarbonat dalam rangka penyusunan regulasi, juga mempengaruhi jadwal uji dan pemenuhan timeline pengujian sampel pengawasan rutin.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh kemampuan laboratorium dalam memenuhi ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian serta Juknis Regionalisasi terkait parameter uji yang harus dilakukan, juga oleh pemenuhan timeline pengujian, sehingga hal-hal yang dapat mendukung terpenuhinya Kemampuan tersebut tentu akan menunjang keberhasilan kegiatan.

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya jumlah produk pangan yang beredar di masyarakat dan beragamnya kondimen dan BTP yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi produk pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium Pangan untuk lebih meningkatkan kemampuan ujinya.
- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metoda yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat.

- Banyaknya sampel kasus yang menjadi isu eksternal dan internal akhir-akhir ini, termasuk juga pengujian kemasan pangan polikarbonat dalam rangka penyusunan regulasi, juga mempengaruhi jadwal uji dan pemenuhan timeline pengujian sampel pengawasan rutin.
- Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji juga dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.
- Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Sudah dilaksanakan, namun perlu dilaksanakan terus secara berkelanjutan dan konsisten	penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Sudah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2023
3	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Sudah dilaksanakan, namun masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023

**Sasaran Strategis-7: Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7**

**23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

**a. *Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV***

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	60,39	104,12	Memenuhi Ekspektasi

**Tabel 30. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [ d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

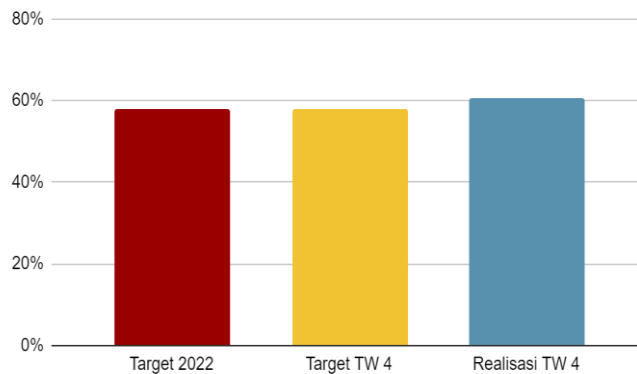
Capaian persentase keberhasilan Penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan keempat atau Oktober-Desember 2022 adalah **sesuai target** yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan **60,39** dari target tingkat keberhasilan di triwulan keempat 2022 sebesar **58** dengan kriteria "**baik**". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan keempat atau periode Oktober-Desember 2022, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian TW IV dengan target Tahun 2022**

Target indikator "**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**" pada TW IV ini adalah 58% dengan realisasi indikator pada TW IV sebesar 60,39% dengan capaiannya yaitu 104,12% termasuk kriteria "**Memenuhi Ekspektasi**". Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 58% dengan capaian tahun 2022 yaitu 104,12% jika disimpulkan sesuai dengan SK KaBPOM terbaru No. 128 Tahun 2022 termasuk kategori "**Efektif**".

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan 2021 adalah terdapat penurunan capaian dari 152,30% di tahun 2021 menjadi 104,12% di tahun 2022. Apabila dianalisis, penurunan ini tidak menunjukkan penurunan kinerja. Capaian kinerja di triwulan keempat tahun 2021 adalah tidak dapat disimpulkan sedangkan di tahun 2022 capaian kinerjanya adalah baik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pada periode yang sama di tahun 2021 dan 2022, kinerja penindakan telah memenuhi target. Capaian ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan penanganan perkara tahun 2022.

### 23-Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan



Gambar 22. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara (Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring/luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang lebih optimal dan berkelanjutan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan pertama ini merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat capaian P21 atas beberapa perkara tunggakan. Hal ini menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian perkara yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2022.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait yang semakin solid  
Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Poksi Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada triwulan pertama ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran pangan olahan mengandung bahan berbahaya. Kerja sama lintas sektor ini dilakukan sejak kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan.
4. Pelaksanaan asistensi atau bantuan teknis oleh Deputi Bidang Penindakan yang lebih optimal  
Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam penanganan/penyelesaian perkara khususnya perkara tunggakan adalah melalui pelaksanaan asistensi/pemberian bantuan teknis oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Terdapat penambahan kegiatan untuk fungsi cegah tangkal di tahun 2022 ini. Dengan demikian, upaya pencapaian kinerja ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, pengaduan masyarakat, dan juga dari akses informasi yang dimiliki. Selanjutnya kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi kegiatan ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara dan koordinasi dengan CJS yang lebih intensif	Sudah dilaksanakan	Koordinasi intens dengan CJS (Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Wassidik)	Desember 2022 (selesai)

**24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta**

**a. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV**

Tabel 31. Indeks RB BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB di BBPOM Jakarta	83.40	89,98	107,89	Memenuhi Ekspekstasi

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%



**b. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target tahun 2022**



Realisasi indikator “Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta” pada TW IV adalah sebesar 89,98% dengan capaian sebesar yaitu 107,89% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, namun tetap dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi pada periode yang akan datang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai Besar POM di Jakarta belum berhasil mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2022 karena keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung oleh keenam komponen pengungkit. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana keenam komponen tersebut dapat mendukung komponen hasil pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BBPOM di Jakarta telah melakukan berbagai inovasi di semua area perubahan. Hal ini memberikan daya ungkit terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Di tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menginternalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh pegawai Balai Besar

POM di Jakarta. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyebaran informasi melalui media sosial secara berkala, komunikasi berbasis elektronik untuk koordinasi dan perkuatan kompetensi pegawai yang focus pada pelayanan public yang prima.

**e. Tindak Lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi	Selesai		

**25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta**

**a. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV**

Tabel 32. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai AKIP di BBPOM di Jakarta	80	80,34	100,43	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90

BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

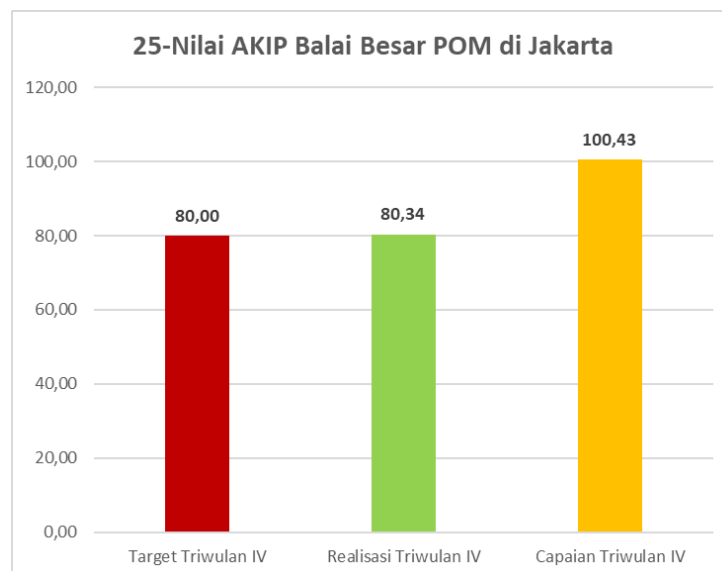
B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60

C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

**b. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target tahun 2022**



Realisasi indikator “Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta” pada TW IV adalah sebesar 80.34% dengan capaian sebesar yaitu 100,43% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspetasi”, namun tetap dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi pada periode yang akan datang

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan surat dari Inspektur Utama B-PI.04.7.72.01.23.10 tanggal 18 Januari 2023 tentang hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 BBPOM di Jakarta memperoleh nilai 80,34 yang termasuk kategori A “Memuaskan”. Terdapat peningkatan dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 79,85 dengan kategori BB. Secara rinci, hasil penilaian SAKIP BBPOM di Jakarta tahun 2022 terhadap komponen dan subkomponen penyusunnya sebagai berikut:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Unit	
			Y	NILAI
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	89.13%	26.74
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	89.38%	8.94
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	100.00%	2.00
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	93.75%	4.69
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	75.00%	2.25
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	89.00%	17.80
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	100.00%	4.00
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	90.00%	9.00
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	80.00%	4.80
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	77.50%	19.38
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	93.75%	4.69
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	77.50%	9.69
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	66.67%	5.00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	90.43%	13.56
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	100.00%	3.00
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	92.86%	6.96
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	80.00%	3.60

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Unit	
			Y	NILAI
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	64.10%	6.41
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2.00	85.50%	1.71
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5.00	64.00%	3.20
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	50.00%	1.50
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	68.81%	13.76
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7.50	60.00%	4.50
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	185.23%	9.26
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100.00</b>	<b>79.85 %</b>	<b>79.85</b>

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Pelaksanaan kegiatan monev secara tepat waktu melalui beberapa aplikasi yaitu BOC, RHPK, SMART DJA, Bappenas dan e-performance. Ketepatan waktu pelaporan dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf Balai Besar POM di Jakarta, perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua poksi hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat, ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing poksi, kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Rapat evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala setiap bulan dalam rangka monitoring capaian kinerja dan merumuskan tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja
3. Program pengumpulan data kinerja online melalui Slipitug Kinerja secara konsisten setiap bulan
4. Adanya SK Pedoman Penilaian Kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja

**e. Tindak Lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar untuk pemberian reward/punishment	Sudah dilaksanakan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan	Sepanjang tahun 2023

			program/kegiatan, rekomendasi perbaikan	
--	--	--	---	--

**Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**

**26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta**

**a. *Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV***

Tabel 33. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,5	85,24	100,88	Memenuhi Ekspekstasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

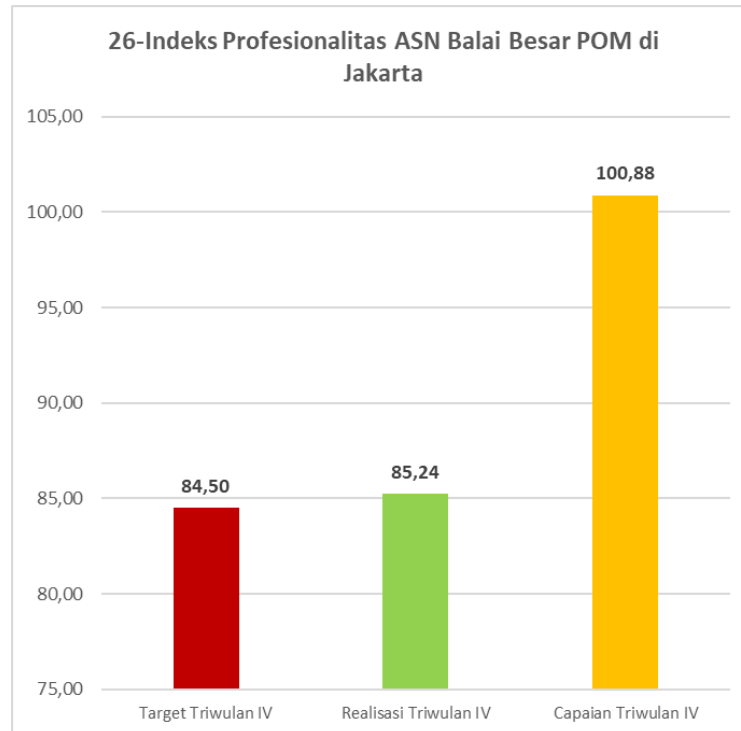
Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

**b. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator “Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta Jakarta” pada TW IV adalah sebesar 85,24% dengan capaian sebesar yaitu 10,88% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspetasi”, namun tetap dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi pada periode yang akan datang



**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indeks profesionalitas adalah karena diperolehnya nilai penuh untuk aspek kinerja yang menunjukkan bahwa penilaian kinerja pegawai telah seluruhnya dalam kriteria baik. Pendidikan formal pegawai yang sebagian besar adalah sarjana ikut menyumbang capaian pada aspek kualifikasi. Selain itu capaian pengembangan kompetensi pegawai telah memenuhi target jam pelajaran yang ditetapkan untuk diklat fungsional dan teknis.

Nilai aspek disiplin masih belum sempurna dikarenakan pada tahun 2019 terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin ringan. Penilaian aspek disiplin berlaku lima tahun sebelumnya.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung oleh banyaknya kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai Balai Besar POM di Jakarta yang memiliki bobot tertinggi (40%) dalam penilaian. Mulai

tahun 2020 tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sehingga dikarenakan telah dilakukannya monitoring dan evaluasi yang lebih ketat dan adanya inovasi IKANTELAT (Ikrar Mantan Telatan).

**e. Tindak Lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengembangan kompetensi individu selalu menjadi target untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pegawai,	Sudah dilaksanakan		

**Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10**

**27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

**a. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV**

Tabel 35. persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP

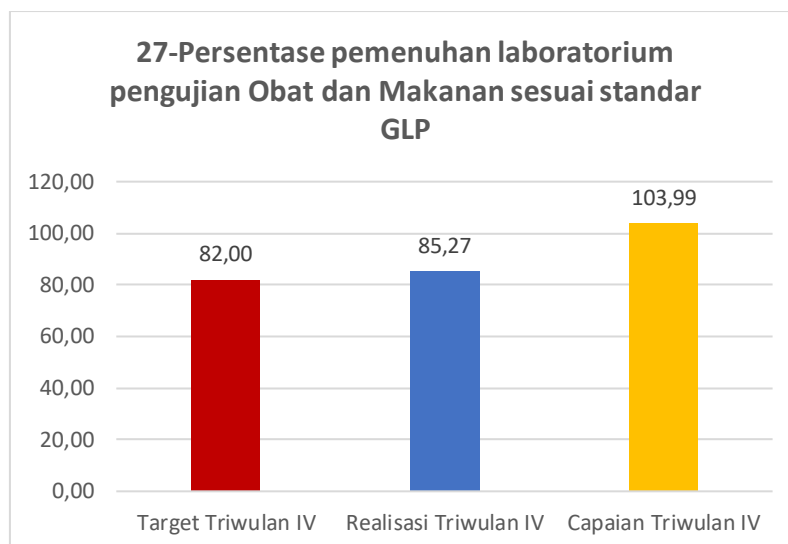
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	85,27	103,99	Memenuhi Ekspektasi

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

**b. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Realisasi indikator “pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” pada TW IV adalah sebesar 85.27% dengan capaian sebesar yaitu 103.99% termasuk kriteria “Memenuhi Ekspetasi”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 , maka disimpulkan termasuk kategori “Efektif”.





**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Berdasarkan penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada akhir Desember 2022, Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk presentase pemenuhan SKL laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 85.27%, melebihi batas target yang ditetapkan yaitu 82%.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pencapaian pernyataan kinerja**

- Program regionalisasi Laboratorium yang dimulai tahun 2022 ini, khususnya untuk Laboratorium Obat yang mengerjakan sampel dengan kelas terapi Antiinfeksi umum, organ sensorik, dan Antineoplastik yang disampling dari seluruh Balai Besar/balai/Loka POM di Region 3 yaitu BBPOM di Jakarta (Koordinator), BBPOM di Serang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Semarang, BBPOM di Yogyakarta, Loka POM di Tangerang, Loka POM di Tasikmalaya, Loka POM di Bogor, dan Loka POM di Banyumas. Dengan luasnya daerah/ lokasi sampling cukup menambah jenis sample dan sediaan yang diuji oleh Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta sehingga ruang lingkup pengujian bertambah.
- Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi seriap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.

- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.
- Peningkatan presentase pemenuhan standar peralatan agak sulit dicapai, karena kondisi luas ruangan laboratorium BBPOM di Jakarta yang kurang memungkinkan untuk penambahan jumlah alat yang sesuai standar.
- Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan ruang lingkup pengujian	Sudah dilaksanakan	Program regionalisasi Laboratorium (khususnya Laboratorium Obat) menambah standar kemampuan laboratorium	TW I Tahun 2023
2		Sudah dilaksanakan	Menjadi penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium (Penetapan Kadar Azitromisin Tablet)	TW I Tahun 2023
3		Sudah dilaksanakan	Verifikasi Metode Analisis yang belum pernah dilakukan antara lain: (PK Etilen Glicol dan Dietilen Glicol dalam sediaan sirup secara GCMS), PK Methotrexate Injeksi (Obat Kanker)	TW I Tahun 2023
4		Sudah dilaksanakan	Mengikuti Program Uji Profisiensi	TW I Tahun 2023
5	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Sudah dilaksanakan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	TW I Tahun 2023

## 28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

### a. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV

Tabel 36. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,25	2,88	128	Tidak Dapat Disimpulkan

SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM. Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email*, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Dihitung Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

#### 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (BPOM Command Centre)

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

#### 2. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 – 3 : Optima

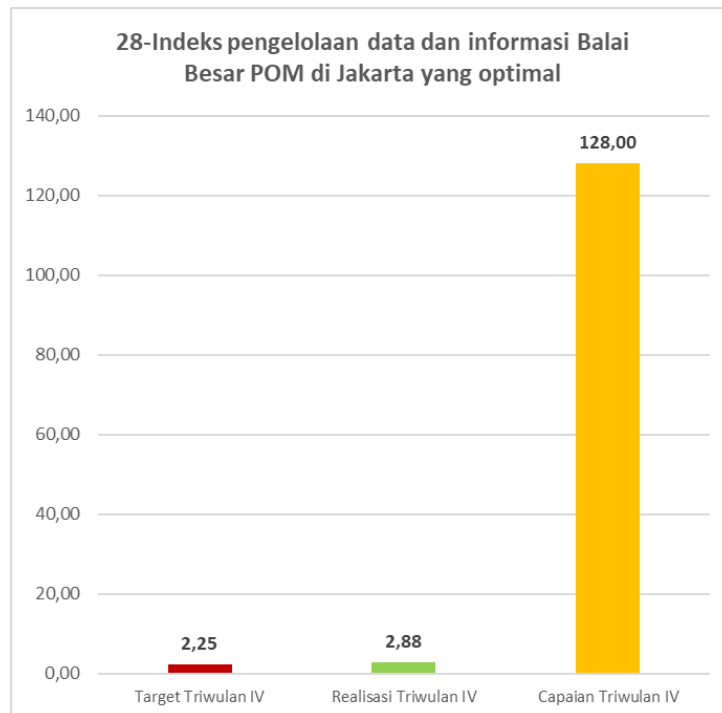
1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

**b. Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target tahun 2022**

Target indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal” TW III ini adalah 2.25 dengan realisasi indikator pada TW IV adalah 2.88 dengan capaiannya yaitu 128% termasuk kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.



Gambar 23. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Jumlah Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki *job description* yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

Komponen yang belum memenuhi target adalah nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC/SIPT.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email *corporate* secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara optimal
- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.
- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/ berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)
- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi
- Regionalisasi laboratorium mempengaruhi ketepatan waktu input sampling dan hasil uji pada SIPT, hal ini disebabkan diperlukan waktu tambahan untuk konsolidasi data

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan upaya pemenuhan nilai masing-masing dari komponen pendongkrak nilai indeks pengelolaan data diantaranya adalah pemanfaatan email corporate, spimker, sharing folder pemanfaatan BOC, dan SIPT	Selesai		

**Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11**

**29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta**

a. *Perbandingan realisasi capaian TW IV dengan target TW IV*

Tabel 37. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian TW IV	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	92,5	91,84	99,29	Belum Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian dengan formulasi pada tahun 2022 seperti pada Gambar 30.

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No. 2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,70%
Konsistensi	18,20%
Capaian Realisasi Output	43,50%
Efisiensi	28,60%

Nilai IKPA dan EKA dapat dilihat pada Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) atau Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).



Gambar 24. Nilai EKA BBPOM Jakarta per Desember 2022 pada aplikasi SMARTDJA

Sampai Dengan : DESEMBER

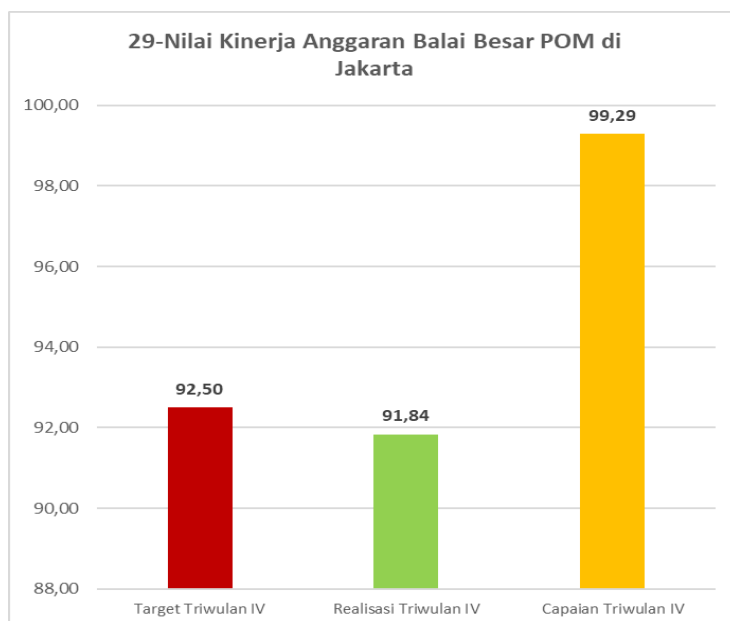
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	175	063	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	85.62	97.32	100.00	95.89	94.52	100.00	100.00	97.07	100%	97.07	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.56	19.46	10.00	9.59	9.45	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.81		97.55					100.00				

**Disclaimer:**  
 Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 25. Nilai IKPA BBPOM Jakarta TW IV tahun 2022 pada aplikasi OMSPAN

**b. Perbandingan realisasi capaian dengan target tahun 2022**

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta” pada TW IV ini adalah 92,5 dengan realisasi indikator pada TW IV sebesar 91,84 dengan capaiannya yaitu 99,29% termasuk kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, sesuai dengan SK KaBPOM terbaru No.128 Tahun 2022 termasuk kategori “Kurang Efektif” diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada periode selanjutnya.



Gambar 26. Perbandingan Realisasi TW IV dibandingkan dengan Target TW IV dan Target Tahun 2022 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai kinerja anggaran tahun 2022 BBPOM di Jakarta mengalami peningkatan cukup signifikan, dan memperoleh peringkat tertinggi diantara Balai Besar-Balai POM di Indonesia berdasarkan monitoring dan evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Hal yang mendukung keberhasilan peningkatan capaian ini adalah:

1. Nilai belanja kontraktual, revisi DIPA dan dispensasi SPM pada IKPA memperoleh nilai penuh karena dilakukan monitoring secara lebih ketat
2. Nilai deviasi halaman III DIPA mengalami kenaikan walaupun masih terdapat deviasi yang cukup besar pada belanja modal bulan Januari, Juni, dan Agustus yang disebabkan data anomali dan tidak terealisasinya pengadaan. Hal ini menyebabkan menurunnya/ berkurangnya nilai Halaman III DIPA
3. Alternatif solusi terhadap halaman III DIPA yaitu memastikan realisasi dilaksanakan sesuai dengan jenis belanja pada periode yang ditetapkan serta melakukan penyesuaian Halaman III DIPA pada saat ada *open periode*.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:



- Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
- Pengalihan beberapa kegiatan dari onsite menjadi daring, misal pengawasan sarana produksi dan distribusi sehingga mampu berkontribusi terhadap tingkat efisiensi Program Pengawasan dan Pengendalian Lembaga karena realisasi volume outputnya jauh melampaui target
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi output secara berkala

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perlu dilakukan penyusunan RPD dan monev pelaksanaan kegiatan secara akurat agar target RPD dapat tercapai	Dalam Progress	- Mengoptimalkan capaian output untuk meningkatkan nilai efisiensi - Melaksanakan revisi halaman III DIPA	Sepanjang tahun 2023

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada TW IV pagu anggaran adalah sebesar Rp 43.705.622.000 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 43.586.926.108 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu serratus delapan rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,73%. Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

### 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tabel 38. Nilai Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jakarta TW IV

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	80,39	99,25	455.244.300	451.672.950	99,22	1,00	0,00	88%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,50	94,16	98,59	256.188.000	255.306.708	99,66	0,99	-0,01	75%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	75,00	92,59	455.244.300	451.672.950	99,22	0,93	-0,07	75%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	88,00	106,02	256.188.000	255.306.708	99,66	1,06	0,06	88%
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	76,80	86,29	50.338.400	49.739.221	98,81	0,87	-0,13	75%
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87,00	91,04	104,64	168.065.100	165.510.641	98,48	1,06	0,06	88%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,70	95,10	108,44	43.462.500	43.414.383	99,89	1,09	0,09	88%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76,65	80,22	104,66	196.075.950	193.095.748	98,48	1,06	0,06	88%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	91,00	96,03	105,53	3.069.000	3.065.625	99,89	1,06	0,06	88%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	102,83	114,26	309.634.250	307.879.352	99,43	1,15	0,15	88%
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,00	79,93	101,18	316.632.000	314.721.257	99,40	1,02	0,02	88%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87,00	97,80	112,42	312.063.000	304.518.500	97,58	1,15	0,15	88%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	71,31	113,19	135.006.000	133.652.515	99,00	1,14	0,14	88%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00	84,22	112,29	484.262.500	482.106.189	99,55	1,13	0,13	88%
15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,30	4,72	109,77	196.075.950	193.095.748	98,48	1,11	0,11	88%
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	77	100,00	63.421.500	63.106.883	99,50	1,00	0,00	88%
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	95,06	100,70	2.353.862.000	2.350.893.805	99,87	1,01	0,01	88%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00	65	100,00	720.402.000	705.415.296	97,92	1,02	0,02	88%
19	Jumlah desa pangan aman	21,00	21	100,00	1.046.723.000	1.041.629.690	99,51	1,00	0,00	88%
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	3	100,00	111.008.100	109.885.560	98,99	1,01	0,01	88%
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,52	99,52	390.209.400	387.148.243	99,22	1,00	0,00	88%
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,83	99,83	241.164.000	240.988.800	99,93	1,00	0,00	75%
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	60,39	104,13	1.267.408.000	1.250.400.000	98,66	1,06	0,06	88%
24	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,40	89,98	107,89	283.344.000	280.709.958	99,07	1,09	0,09	88%
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80,00	80,34	100,43	587.597.000	586.705.519	99,85	1,01	0,01	88%
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,50	85,24	100,88	164.296.000	163.922.000	99,77	1,01	0,01	88%
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	82,00	85,27	103,99	5.551.243.000	5.548.458.065	99,95	1,04	0,04	88%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Obat dan Makanan sesuai standar GLP									
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,88	128,00	18.234.000	16.532.735	90,67	1,41	0,41	88%
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,50	91,84	99,29	27.076.660.000	27.045.407.206	99,88	0,99	-0,01	75%

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan IV Tahun 2022 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 21 (dua puluh satu) indikator mencapai target dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"** ( $100\% < x < 120\%$ ); 7 (tujuh) indikator dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** yaitu ( $80\% < x < 100\%$ ); 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**,
2. Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dengan jumlah anggaran BBPOM di Jakarta Rp. 43.705.622.000 pada triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.586.926.108 dengan capaian 99.73%. BBPOM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap tahun sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA.

Secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022 dapat dicapai.

#### 4.2. Saran

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada periode berikutnya.
2. Monitoring dan evaluasi terus menerus akan dilakukan pada periode selanjutnya
3. Konsistensi revisi Halaman III Dipa yang perlu dikawal ketat
4. Melakukan optimalisasi kinerja agar semua target IKU tercapai
5. Membuat inovasi yang mendukung kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Jakarta  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BBPOM di Jakarta

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.65
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.30
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	21
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100



<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
45,606,169,000.00

Pihak Kedua

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022

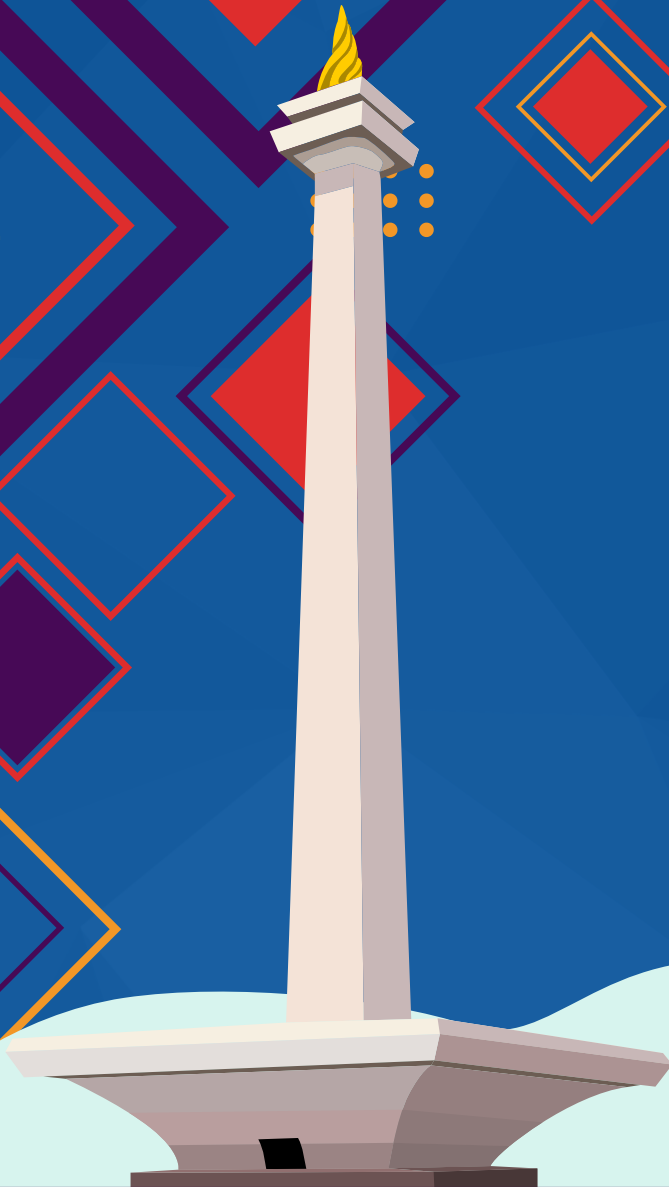


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Jakarta  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	298.193.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	298.193.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	50.898.400,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												87	318.225.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												87.7	46.325.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												76.65	123.287.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	330.571.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	396.496.750,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	396.496.750,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	295.830.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	160.788.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	632.205.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT											4.30		371.262.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,3	6,7	23,3	30	36,7	36,7	36,7	36,7	53,3	66,7	96,7	77	85.159.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	30	30	55	70	70	70	90	90	90	65	767.240.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	25	25	35	40	50	60	65	70	85	21	1.097.149.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	398.702.100,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	277.407.600,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	58	1.444.888.000,00
23.	Indeks RB UPT											83,4		91.936.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80		54.154.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84,5		27.090.178.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82		6.770.065.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.915.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75	76	77	78	79	80	82	84	86	88	90	92,5	28.600.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	40	60	70	70	70	70	90	90	3	110.081.000,00
Total													45.606.169.000,00	



# BALAI BESAR POM DI JAKARTA

JL. AS SYAFIIYAH NO.133 RT.3 RW.3, CILANGKAP, KEC.CIPAYUNG,  
KOTA JAKARTA TIMUR 13870